



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2021 – 2026



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR**

Jl. Prov. Dr. Moh. Yamin No. 33 Palu 94114 Telp/fax (0451) 4015509 Palu - 94114  
Website : [www.cikasda.sultengprov.go.id](http://www.cikasda.sultengprov.go.id) Email : [cikasda@sultengprov.go.id](mailto:cikasda@sultengprov.go.id)

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran untuk periode lima tahun mendatang. Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Substansi Renstra ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. RPJMD 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025.

Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah merupakan acuan bagi bidang-bidang dan UPT lingkup Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran serta evaluasi kinerja (antara lain RENJA, RKA dan LAKIP).

Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa serta segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, mengharapkan seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai sehingga mensukseskan program pemerintah terutama melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang **maju, damai, sejahtera** dan **mandiri**.

Palu, 2 Januari 2023

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN  
SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. ANDI RILY DJANGGOLA, SE.,M.Si  
Nip. 19801216 200212 1 003





## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH.....	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	14
2.2 Sumber Daya .....	17
2.3 Kinerja Pelayanan OPD .....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air.....	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	44
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	49
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD .....	49
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	71
5.1 Strategi .....	71
5.2 Kebijakan.....	73
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	82
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	93
BAB VIII PENUTUP.....	107
8.1 Kesimpulan.....	107
8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	107
8.3 Rencana Tindak Lanjut .....	108



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (Tabel T-C.23).....20

Tabel 2.2 (Tabel T-C.24).....21

Tabel 3.1 (Tabel T-B.35).....33

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR.....33

Tabel 4.1 (Tabel T-C.25).....69

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2021-2016 .....79

Tabel 6.1 (Tabel T-C.27).....84

Tabel 7.1 (Tabel T-C.28).....94

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... 104



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan untuk mengarahkan program/kegiatan siklus pelaksanaan perencanaan kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang penting, sudah selayaknya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan perhatian dan kontribusi dalam pelaksanaan dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas pelaksanaan tersebut. Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi yang penting dan sangat fundamental dalam system perencanaan daerah karena Renstra merupakan perencanaan pada unit Organisasi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada RKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Dokumen Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air memuat informasi tentang program kerja yang ingin dicapai dalam tahun berjalan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Selain hal tersebut termuat pula penjelasan-penjelasan yang terkait dengan sasaran kebijakan dengan programnya serta yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air.

Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang mempunyai peranan penting terhadap perencanaan, pengelolaan yang berkelanjutan.

Perubahan paradigma dalam pembangunan daerah telah mendorong munculnya peluang prakarsa lokal yang lebih mendominasi keberagaman situasi, kondisi dan potensi daerah, dengan ciri-ciri munculnya peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan yang berorientasi pada keinginan publik dan berwawasan regional serta melibatkan stakeholder.

Berdasarkan prinsip-prinsip desentralistik, partisipatif, demokrasi dan keterbukaan, maka pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan, peran aktif dan tanggung jawab masyarakat dalam hal ini pengelolaan Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air agar masyarakat tampil sebagai subyek atau pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah daerah berperan memfasilitasi masyarakat

Pada prinsipnya pembangunan Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air tidak hanya ditentukan oleh kinerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air semata, tetapi dipengaruhi juga oleh interaksi yang dinamis dan saling bersinergis dengan sektor-sektor lainnya. Karenanya untuk menunjang keberhasilan tersebut diperlukan keterpaduan, kerjasama, koordinasi yang lebih baik dari berbagai sector tersebut dalam upaya mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, dengan demikian Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini diharapkan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi untuk mencapai kinerja terbaik Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah pada masa yang akan datang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Tahun Ke I atau tahapan awal dari Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sampai 2026, serta Pelaksanaan Tahun Ke II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ((RPJMN) Tahun 2020 – 2024, serta tahun keempat Rencana Strategi Pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dan 2021-2026. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No.17 Tahun



2003 tentang keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diterbitkan Peraturan pemerintah (PP) No.20 Tahun 2004 tentang Rencana kerja anggaran Kementrian/Lembaga (RKAKL) yang keduanya bertujuan menyambung antara proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan Penganggaran tersebut disesuaikan dan ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan. Rancangan RENSTRA ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tantang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
  14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan Ruang;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  27. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
  28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  35. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Tehnis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
  36. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Tehnis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  39. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
  40. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);



42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor.140);
44. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2018;
45. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang menjadi tolak ukur dan acuan penyusunan usulan program/kegiatan setiap tahun dalam waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah merupakan acuan penentuan prioritas program/kegiatan tahunan daerah yang disusun dengan maksud :

1. Sebagai acuan/ pijakan bagi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam berpartisipasi terhadap pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air di Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.
2. Sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air di Provinsi Sulawesi Tengah

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air secara makro di Provinsi Sulawesi Tengah dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi-misi Pemerintah Daerah.

Disamping maksud tersebut di atas, maka rencana Strategis ini juga akan dapat bermanfaat :

- 1) Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. Perubahan terjadi akibat peningkatan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, menipisnya sumber daya. Dengan perencanaan strategis organisasi dapat menyiapkan perubahan secara pro aktif bukan sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.
- 2) Untuk Pengelolaan Keberhasilan Dengan Perencanaan Strategis organisasi dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 3) Agar organisasi berorientasi pada masa depan. Perencanaan Strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis untuk berbagai alternative dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa yang akan datang.
- 4) Agar organisasi dapat bersifat adaptip. Perencanaan Strategis harus bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengankondisi yang ada untuk menangkap peluang. Walaupun demikian, capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam Perencanaan Strategis.
- 5) Meningkatkan pelayanan prima. Kepuasan pelanggan merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi. Pemahaman terhadap siapa pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan sangat diperlukan.

Karena itu, pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

- 6) Meningkatkan Komunikasi. Implementasi Perencanaan Strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Organisasi diharapkan dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit-unit kerja
- 7) Menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi. Berbagai sumber dapat digunakan melalui pengalokasian secara fokus pada prioritas-prioritas kunci.
- 8) Meningkatkan Produktivitas. Produktivitas organisasi ditingkatkan melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi.

Perencanaan Strategik pada dasarnya merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang ditetapkan Dinas/Lembaga/Pimpinan organisasi untuk menjadi acuan pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategik ini sangat berhubungan dengan Dokumen Perencanaan Lain:

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), maka Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air ini harus mengacu kepada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Nasional (DPJPN). Sedangkan RPJMN (Periode 2020 – 2024) dan RPJMD (Periode 2021-2026) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen perencanaan yang berawasan 5 tahunan yang menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 merupakan



penjabaran teknis bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air atas RPJM Nasional. Dokumen perencanaan tersebut merupakan perencanaan teknis bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air memuat arah kebijakan pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air dan rencana program kegiatan bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air setiap fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra tersebut menjadi rujukan dan acuan untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden nomor 02 tahun 2015 dan hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka sebagai salah satu pelaku pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Kementerian telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.
4. Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2005-2025, Dokumen Rencana Jangka Panjang Bidang Pekerjaan Umum (RPJP) 2005-2025, mengisyaratkan bahwa kondisi pembangunan Cipta Karya dan Sumber Daya Air diharapkan mampu memberikan dampak terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **1.4 SISTIMATIKA PENULISAN**

Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunan Rencana Strategik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah.
- 2.2. Sumber Daya Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dengan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air provinsi serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya pada bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang meliputi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum;



- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

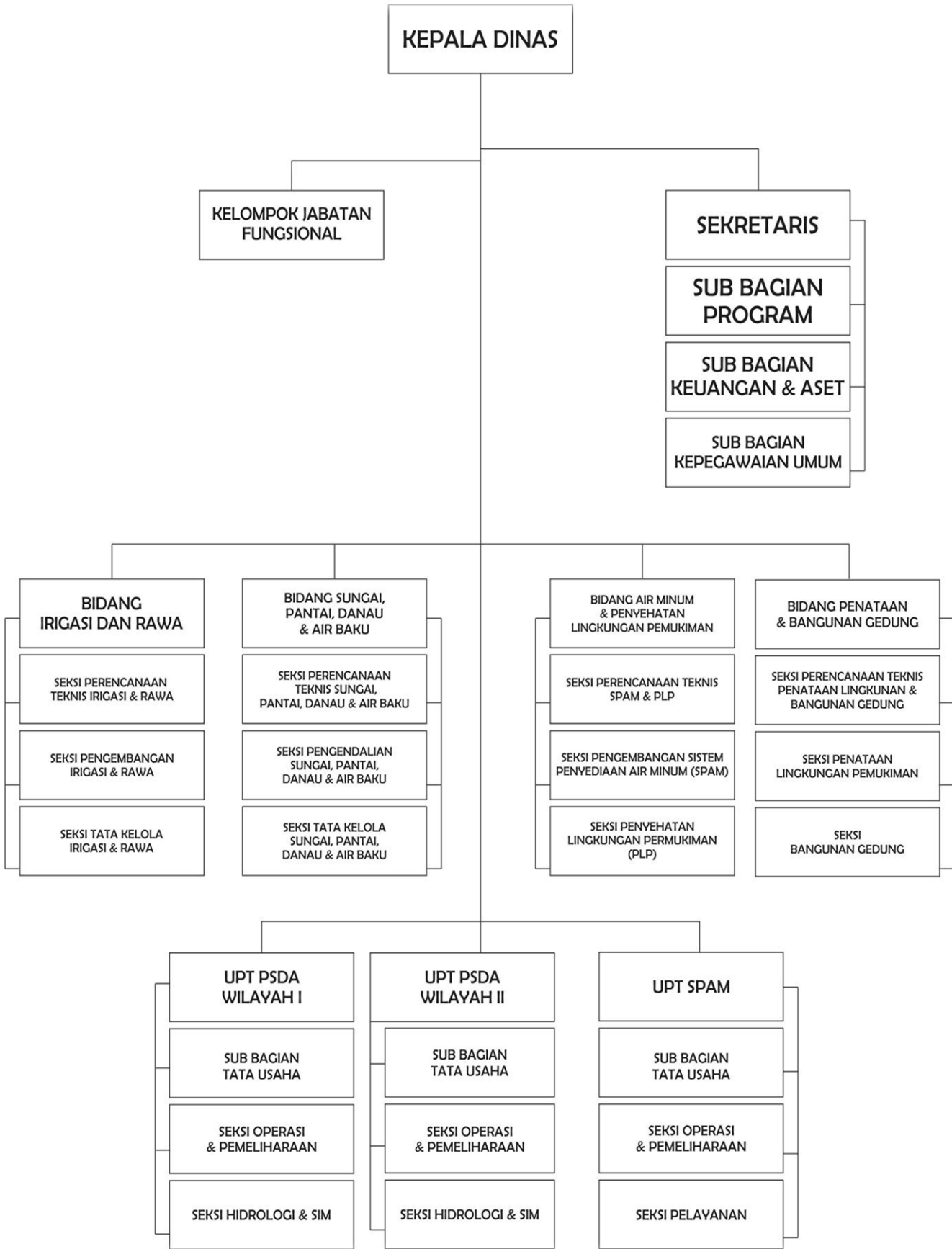
Susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada bagan struktur organisasi.



STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

PROVINSI SULAWESI TENGAH



2.2 SUMBER DAYA

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan faktor utama sebagai unsur manajemen yang akan menentukan keberhasilan suatu institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi yang dituju dan diharapkan. Adapun sumber daya manusia yang saat ini bekerja pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Sekretariat dan bidang-bidang termasuk UPTD PSDA Wilayah I dan UPTD PSDA Wilayah II dan UPT-SPAM adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2.1.1

Rekapitulasi pegawai per golongan ruang dan jenis kelamin

No	GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	IV/e	0	0	0
	IV/d	1	0	1
	IV/c	0	0	0
	IV/b	1	1	2
	IV/a	5	6	11
	Sub Total	7	7	14
2	III/d	19	17	36
	III/c	15	13	28
	III/b	24	15	39
	III/a	16	9	25
	Sub Total	74	54	128
3	II/d	25	3	28
	II/c	17	2	19
	II/b	29	0	29
	II/a	13	0	16
	Sub Total	84	5	89
4	I/d	4	0	4
	I/c	3	0	3
	I/b	2	0	2
	I/a	1	0	1
	Sub Total	10	0	10
TOTAL		175	66	241

Tabel.2.2.1.2  
Rekapitulasi pegawai per pendidikan dan jenis kelamin

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	SD	5	0	5
2	SMP	7	0	7
3	SMA/SMK	82	5	87
4	D.I	0	0	0
5	D.II	0	0	0
6	D.III	10	4	14
7	S1/D.IV	58	39	97
8	S2	13	18	31
9	S3	0	0	0
TOTAL		175	66	241

### 2.2.2. Aset

Aset merupakan salah satu sarana/prasarana yang berupa harta yang dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air Daerah, baik itu asset bergerak maupun tidak bergerak, antara lain tanah, peralatan dan mesin baik alat-alat besar maupun alat-alat kecil bergerak maupun tidak bergerak, alat-alat bengkel, perkakas kecil, alat ukur, alat laboratoruium, alat kantor dan rumah tangga, bangunan dan gedung, instalasi irigasi. Rincian aset yang dimiliki Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2.1**

Aset Tetap Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air

URAIAN	31 Desember 2020
Tanah	26.028.766.000
Peralatan dan Mesin	23.718.457.578
Gedung dan Bangunan	11.401.728.221
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.606.584.724.362
Aset tetap lainnya	3.639.518.056
Konstruksi dalam pengerjaan	23.058.820.036
Aset Lainnya	112.742.454.482
JUMLAH ASET TETAP	1.694.432.014.253



### 2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk mengukur keberhasilan tersebut pemerintah telah menerapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate melalui Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah atau OPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pengukuran kinerja OPD telah dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan Ke-CiptaKarya-an dan Sumber Daya Air ditetapkan beberapa indikator kinerja kunci. Indikator tersebut digunakan untuk menilai kinerja pembangunan Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Berikut dapat dilihat kinerja pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang dicapai berdasarkan target-target tahun 2017 sampai tahun 2020 sebagai berikut pada **tabel 2.1**. Pencapaian Kinerja Pelayanan Opd Cipta Karya Dan Sumber Daya Air 2017-2020 Provinsi Sulawesi Tengah dan **tabel 2.2**. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Opd Cipta Karya Dan Dinas Sumber Daya Air 2017-2019 Sulawesi Tengah.

**Tabel 2.1 (Tabel T-C.23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR 2017-2020**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.</b> Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi Meningkatnya Indeks Kinerja Sistim Irigasi (IKSI) (%)	- -	IKK -	- -	0,707 -	0,727 -	- 59	- 62	0,707 -	0,710 -	- 59	- 57	1,00 -	0,98 -	- 1,00	- 0,92
2	<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b> Meningkatnya Ketersediaan Air Baku (litr/det)	-	-	-	10	10	9	10	10	12	9	0	1,00	1,20	1,00	-
3	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konsevasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya</b> Meningkatnya luas kawasan yang terlindung dari bahaya banjir (Ha)	-	-	-	19	19	15	19	33,45	14,61	58,76	23,48	1,76	0,77	3,92	1,24
4	<b>Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai</b> Luas kawasan yang terlindung dari bahaya abrasi pantai (Ha)	-	-	-	4	4	28	7	4,53	5,75	18,83	12,89	1,13	1,44	0,67	1,84
5	<b>Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b> Prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	- -	- -	- -	61,61 60,09	64,14 63,08	66,67 66,07	- -	59,26 63,25	60,10 59,15	61,49 59,29	- -	0,96 1,05	0,94 0,94	0,92 0,90	- -
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlidungi di kawasan Strategis Daerah Provinsi.	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	21	-	-	-	0,14
	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.	-	IKK	SPM	-	-	-	95	-	-	-	0	-	-	-	0
	Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota.	-	-	SPM	-	-	-	50	-	-	-	50	-	-	-	1,00
6	<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b> Jumlah bangunan gedung Strategis Daerah Provinsi yang dapat dimanfaatkan secara optimal.	-	-	-	3	4	-	-	1	2	-	-	0,33	0,50	-	-
	Terpeliharanya infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi	-	-	-	-	-	2	2	-	-	9	8	-	-	4,50	4,00
7	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</b> Luas daerah genangan yang tertangani (Ha)	-	-	-	400	400	400	400	225	105	280	135	0,56	0,26	0,70	0,34

**Tabel 2.2 (Tabel T-C.24)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD CIPTA KARYA DAN DINAS SUMBER DAYA AIR 2017-2019**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.</b> Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi	Rp 32.272.728.892	Rp 49.633.710.300	Rp 82.792.316.424	19.305.617.659	Rp 31.121.305.433	Rp 48.083.787.430	Rp 81.681.500.645	18.991.707.726	0,96	0,97	0,987	0,98	114,64%	98%
2	<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b> Meningkatnya Ketersediaan Air Baku (litr/det)	Rp 1.319.027.400	Rp 2.063.573.950	Rp 2.240.455.600	95.712.500	Rp 1.304.778.200	Rp 2.058.924.084	Rp 2.215.468.889	91.184.000	0,99	1,00	0,989	0,95	89,76%	98%
3	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konsevasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya</b> Meningkatnya luas kawasan yang terlindung dari bahaya banjir (Ha)	Rp 15.667.500.552	Rp 5.019.816.300	Rp 9.511.486.400	3.699.499.020	Rp 15.311.558.549	Rp 4.436.667.414	Rp 9.415.280.005	3.675.359.410	0,977	0,88	0,990	0,99	86,80%	96%
4	<b>Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai</b> Luas kawasan yang terlindung dari bahaya abrasi pantai (Ha)	Rp 6.078.751.560	Rp 21.092.615.858	Rp 29.098.126.300	13.942.285.450	5.720.716.610	20.153.865.238	29.073.534.660	13.914.189.940	0,94	0,96	0,999	1,00	177,62%	97%
5	<b>Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>  Prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak  Prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Rp 14.238.933.050	Rp 8.073.171.165	Rp 13.785.392.675	3.488.207.730	Rp 13.922.122.679	Rp 7.180.875.233	Rp 13.054.699.378	3.357.835.072	0,98	0,89	0,95	0,96	84,25%	94%
6	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b> -	Rp 242.626.600	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 229.296.848	Rp -	Rp -	Rp -	0,95	0,00	0,00	0,00	23,63%	24%
6	<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b> Jumlah bangunan gedung Strategis Daerah Provinsi yang dapat dimanfaatkan secara optimal.	Rp 13.534.550.625	Rp 15.242.970.175	Rp 34.622.660.420	85.976.734.350	Rp 13.133.307.216	Rp 14.073.525.351	Rp 14.380.707.237	85.505.175.267	0,97	0,92	0,42	0,99	196,03%	83%
7	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</b> Luas daerah genangan yang tertangani (Ha)	Rp 4.551.936.200	Rp 2.327.493.000	Rp 5.882.151.600	2.310.388.800	Rp 4.461.080.800	Rp 2.159.180.380	Rp 5.416.820.400	2.303.973.920	0,98	0,93	0,92	1,00	114,38%	96%

#### 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Berdasarkan kondisi geografis yang sangat strategis dengan wilayah yang cukup luas dan potensi yang ada, menjadikan Sulawesi Tengah sebagai daerah yang harus didukung percepatannya dalam pembangunan infrastruktur yang memadai agar dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat pada umumnya ataupun masyarakat Sulawesi Tengah pada khususnya.

Berdasarkan Undang-undang NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan minimal (SPM), Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan

Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Keciptakarya memiliki kewenangan melaksanakan infrastruktur pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, pengelolaan dna pengembangan sistem air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program penataan bangunan dan lingkungannya serta penataan bangunan gedung Berdasarkan jenis pelayanan keciptakarya yang dilakukan terdapat beberapa tantangan yang antara lain :

- a. Adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses air minum layak
- b. Adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses sanitasi layak dan aman
- c. Adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses pengelolaan persampahan
- d. Masih adanya potensi peningkatan genangan dikawasan permukiman

Sedangkan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan **Keciptakarya di** Propinsi Sulawesi Tengah yaitu :



1. Adanya program dari instansi terkait melibatkan semua Pemerintah daerah Kabupaten/kota, lembaga, kelompok masyarakat yang ada untuk saling berkoordinasi.
2. Masih kurangnya layanan akses air minum layak.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya akses sanitasi layak dan aman.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya akses pengelolaan persampahan.
5. Masih banyak kawasan genangan dipermukiman yang belum tertangani.
6. Dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dengan program DAK dan program strategis lainnya.

Luas Fungsional Daerah Irigasi kewenangan Provinsi berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi seluas 47.640 Ha yang tersebar di 30 Daerah Irigasi (DI). Dari 30 Daerah irigasi tersebut, 13 diantaranya memerlukan penanganan rehabilitasi bendung yang usianya sudah lebih dari 30 tahun.

Berdasarkan dokumen pola pengelolaan wilayah sungai bahwa dari 5778,80 km panjang sungai kewenangan provinsi terdapat 577,880 km yang kritis dan sampai dengan tahun 2020 baru 84,075 km tertangani atau baru 14,55%. Panjang pantai kewenangan provinsi sepanjang 4.013 km, 1.450 km diantaranya rawan abrasi. Sampai dengan tahun 2020 baru 13,707 km yang telah ditangani atau 0,95% nya.

Namun demikian perubahan profil dan karakteristik sungai dan pantai yang mengancam permukiman dan obyek-obyek penting perlu diwaspadai karena kerusakan sungai maupun pantai bersifat progresif.

Berdasarkan jenis pelayanan yang dilakukan terdapat beberapa tantangan yang antara lain :

- a. Adanya pemanfaatan lahan yang belum sesuai dengan peruntukannya serta Meluasnya daerah rawan abrasi pantai.
- b. Intensitas bencana Alam dan tanah longsor sehingga mengganggu kondisi dan karakteristik alami sungai.

Sedangkan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sumber Daya Air Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Adanya program dari instansi terkait melibatkan semua lembaga, komisi, kelompok kerja yang ada untuk saling berkoordinasi.
2. Potensi pengembangan daerah irigasi Jaringannya yang belum menjangkau daerah perbatasan dan terisolir.
3. Masih adanya Jaringan irigasi yang belum menjangkau daerah perbatasan dan terisolir.
4. Dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dengan program DAK dan IPDMIP.
5. Tersedianya lahan yang cukup bagi pengembangan sinergitas antar sector.



### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah**

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan factor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal

maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

#### **A. Permasalahan Irigasi dan Rawa**

Pengembangan irigasi di Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan kurang lebih 40 tahun terakhir, dengan memberikan manfaat salah satunya bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Berdasarkan PERMEN PUPR No. 14/PRT/M/2015 Luas Potensial kewenangan Daerah Irigasi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 47.640 Ha dengan Luas Fungsional data Tahun 2020 adalah 34.230 Ha yang tersebar di 30 Daerah Irigasi (9 Kabupaten dan 1 Kota).

Seiring berjalannya waktu, kinerja infrastruktur irigasi mengalami penurunan akibat belum optimalnya Kinerja Sistem Irigasi, hal ini ditunjukkan dengan data hasil survey Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Tahun 2020 sebesar 57,11 % (Kinerja Kurang).

Salah satu faktor pendukung belum optimalnya Kinerja Sistem Irigasi adalah kerusakan jaringan irigasi. Kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat kegiatan illegal logging dan illegal mining, meningkatnya alih fungsi lahan pada lahan pertanian produktif, rendahnya efisiensi air irigasi akibat borosnya penggunaan air, belum lengkapnya sistem jaringan irigasi dan akibat kejadian bencana alam yang mengakibatkan sarana dan prasarana Daerah Irigasi sebagian besar kondisi rusak, rendahnya kinerja Operasi dan Pemeliharaan (OP), kapasitas kinerja kelembagaan pengelola irigasi dan partisipasi masyarakat petani belum optimal, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia belum memadai, pengelolaan aset dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi masih belum optimal.

Faktor lain yang mengakibatkan belum optimalnya Kinerja Sistem Irigasi adalah Pelaksanaan OP irigasi yang belum optimal, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut : pelaksanaan kegiatan OP infrastruktur irigasi belum seluruhnya disosialisasikan dan diterapkan sesuai manual OP yang ada karena manual OP belum seluruhnya tersedia. kurangnya kesiapan kelembagaan baik itu P3A/GP3A/IP3A dan personil pelaksana OP, keterbatasan



penganggaran kegiatan OP belum sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) ditandai dengan rendahnya prioritas kegiatan OP. Akibat dari semua sistim OP kurang berjalan sebagaimana mestinya adalah kinerja irigasi menjadi kurang sehingga perlu dilakukan rehabilitasi, sementara kita kita ketahui biaya untuk melakukan rehabilitasi akibat OP yang tertunda jauh lebih besar dibanding biaya OP yang mestinya normal dikeluarkan tiap tahun.

Keterpaduan Pengelolaan Irigasi belum optimal menjadi salah satu faktor rendahnya Kinerja Sistem Irigasi, hal ini dikarenakan antara lain : Kurang optimalnya koordinasi antara instansi, antar pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten) dan pemilik kepentingan; kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi masih rendah, kelembagaan pengelola irigasi belum optimal, ketidakpastian pendanaan yang berkelanjutan, akurasi dan pembaharuan pengelolaan data dan informasi irigasi masih kurang, kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian/keterampilan yang cukup dalam mendukung Pengelolaan Irigasi.

## **B. Permasalahan Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku**

Salah satu tugas dan fungsi pelayanan Dinas adalah pelayanan di bidang sungai, pantai, danau dan air baku. Hasil evaluasi berbagai faktor permasalahan dan kendala yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut oleh pemerintah daerah antara lain :

### **1. Sistem Informasi Sumber Daya Air yang Belum Maksimal**

Permasalahan sistem informasi SDA yang belum maksimal dapat disebabkan belum optimalnya penyediaan data SDA yang akurat, benar, berkelanjutan, tepat waktu dan mudah diakses. Sistim informasi SDA sangat tergantung pada sebaran pos-pos hidrologi yang secara rasionalisasi masih belum optimum, khususnya pada wilayah sungai kewenangan pemerintah provinsi.

Berdasarkan hasil survey dan pemetaan kondisi hidrologis Wilayah Sungai (WS) menunjukkan kondisi : WS Lambunu-Buol

baru terdapat 27 unit sedangkan kebutuhan untuk rasionalisasi masih dibutuhkan sekitar 10 unit automatic water level record (AWLR) khususnya pada sungai-sungai yang dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi. WS Bongka-Mentawa baru terdapat 23 unit dari 38 yang dibutuhkan untuk rasionalisasi, WS Laa-Tambalako baru terdapat 18 unit dari 25 unit yang dibutuhkan. WS Banggai Kepulauan belum memiliki pos hidrologi dari 10 unit yang dibutuhkan menurut luas kawasan sebaran hidrologisnya.

Terbatasnya jumlah sebaran pos hidrologi mempengaruhi akurasi data hidrologi suatu wilayah sehingga berpotensi memberikan informasi hidrologi yang kurang akurat pula.

Disamping keterbatasan secara kuantitas, pos-pos hidrologi juga membutuhkan pemeliharaan berupa pergantian unit-unit peralatan yang kurang memenuhi syarat dalam pengukuran dan pengambilan/perekaman data curah hujan, suhu, kecepatan angin, kelembaban, cuaca dan level air sungai.

Pos-pos stasiun pengamatan kondisi hidrologi dioperasikan oleh personil petugas dan pengamat pos hidrologi, harus terus ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan-pelatihan disamping kelengkapan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan tugas untuk memaksimalkan kinerjanya dalam sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi.

## **2. Kerusakan Tebing Sungai dan Abrasi Pantai**

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat berdampak pada semakin berkembangnya kawasan pemukiman. Pada bagian hilir daerah-daerah sempadan sungai dan pantai beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman sehingga mempengaruhi kondisi alami sungai dan pantai yang dikategorikan sebagai proses terjadinya kerusakan. Pada jangka waktu relatif singkat kerusakan tersebut berpotensi menimbulkan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa bila tidak tertangani dengan baik.

Perubahan karakteristik sungai dan pantai baik ekologi maupun morfologinya, mempengaruhi kestabilan tebing sungai

ataupun garis pantai yang terus menggerus bagian daratan (degradasi dan abrasi) sehingga dapat merusak obyek-obyek vital

seperti pemukiman maupun fasilitas umum lainnya yang bersifat progresif. Karakteristik sungai juga sangat ditentukan kondisi daerah tangkapan air pada bagian hulu, penutupan lahan terus terbuka oleh perambahan hutan yang berdampak pada perubahan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kerusakan DAS menyebabkan kemampuan tanah menyerap air berkurang sehingga memperbesar aliran permukaan. Tingginya curah hujan menyebabkan permukaan tanah mengalami erosi yang membawa sedimen bersama aliran permukaan yang akan mengendap pada bagian-bagian tertentu dan menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai merubah profil penampang basah menjadi kapasitas yang lebih kecil. Pada akhirnya volume air tidak tertampung dan menimbulkan luapan yang dapat menggenangi dataran rendah (banjir).

### **3. Daerah yang Belum Mendapat Akses Air Baku**

Secara geografis masih terdapat daerah yang sangat kritis terhadap akses air baku disebabkan potensi air baku berupa air permukaan maupun air tanah tidak tersedia. Kondisi ini dibutuhkan pembangunan infrastruktur air baku untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan, baik untuk keperluan rumah tangga sehari-hari maupun untuk kebutuhan usaha pertanian, peternakan dan lain-lain.

Kerusakan yang terjadi pada daerah tangkapan air juga dapat mengakibatkan mengeringnya sumber-sumber mata air sehingga infrastruktur air baku yang telah terbangun menjadi terbengkalai. Olehnya itu dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga kelestarian sumber-sumber mata air serta dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas infrastruktur air baku yang telah terbangun agar dapat terus berfungsi dalam memberikan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan air baku bagi masyarakat.

#### **4. *Pengelolaan Sumber Daya Air Danau belum Terlaksana***

Pada wilayah sungai kewenangan provinsi terdapat potensi sumber daya air danau yang terbentuk secara alami yang belum dikelola. Berdasarkan data inventarisasi danau provinsi Sulawesi Tengah terdapat 26 lokasi danau dengan total luas kurang lebih 427,51 km<sup>2</sup> dan volume tampung 88,54 milyar M<sup>3</sup>. Danau merupakan tampungan air alami yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat langsung berupa konservasi sumber daya air maupun manfaat sosial ekonomi. Kondisi dan karakteristik danau sangat tergantung pada ekosistem daerah aliran sungai. Pada umumnya permasalahan yang sering terjadi adalah proses pendangkalan oleh sedimentasi dan fluktuasi volume air yang tidak stabil.

Fungsi ekologi danau sebagai potensi cadangan tampungan air, saat ini perlu perencanaan pengelolaan sebagai bagian dari konservasi sumber daya air sehingga dapat memberikan manfaat dalam memenuhi ketersediaan air baku.

#### **C. Permasalahan Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung**

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam mengelola Bangunan Gedung Negara yaitu :

- a. Belum tersedianya peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Negara untuk kepentingan Strategis Provinsi
- b. Kurangnya sosialisasi yang mendukung kegiatan penetapan dan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Provinsi
- c. Kurangnya pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara
- d. DED Bangunan Gedung Negara belum mengikuti SNI daerah rawan bencana alam
- e. terbatasnya pendanaan dalam rehab rekon Bangunan Gedung Negara
- f. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait penyelenggaraan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (KSP)



- g. Keterbatasan anggaran untuk menyusun Perda/Pergub bangunan Gedung Negara
- h. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Non teknis tidak melibatkan Pengelola Teknis dalam pengusulan Anggaran Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- i. Terbatasnya anggaran pemeliharaan rutin bangunan gedung negara di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- j. Belum adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus yang menangani Bangunan Cagar Budaya
- k. Terbatasnya anggaran pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya
- l. Terbatasnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan pemeliharaan rutin bangunan gedung Negara
- m. Kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sedangkan untuk infrastruktur permukiman permasalahan yang terjadi yaitu

- a. Data base infrastruktur jalan lingkungan beserta kelengkapannya belum tersedia.
- b. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait penyelenggaraan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman

#### **D. Permasalahan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman**

Berdasarkan Undang-undang NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan minimal (SPM), Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Keciptakarya memiliki kewenangan melaksanakan infrastruktur pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air

minum, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program penataan bangunan dan lingkungannya serta penataan bangunan gedung.

Berdasarkan jenis pelayanan keciptakaryaan yang dilakukan terdapat beberapa tantangan yang antara lain :

- a. Adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses air minum layak.
- b. Adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses sanitasi layak dan aman.
- c. Adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses pengelolaan persampahan.
- d. Masih adanya potensi peningkatan genangan dikawasan permukiman.

Sedangkan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan **Keciptakaryaan di** Propinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Adanya program dari instansi terkait melibatkan semua Pemerintah daerah Kabupaten/kota, lembaga, kelompok masyarakat yang ada untuk saling berkoordinasi.
2. Masih kurangnya layanan akses air minum layak.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya akses sanitasi layak dan aman.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya akses pengelolaan persampahan.
5. Masih banyak kawasan genangan dipermukiman yang belum tertangani.
6. Dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dengan program DAK dan program strategis lainnya.

Untuk Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut pada tabel 3.1 (Lampiran).

**Tabel 3.1 (Tabel T-B.35)**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah "Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air"**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Periode 2021-2026**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
A	IRIGASI DAN RAWA		
1	Belum optimalnya Kinerja Sistem Irigasi.	Kerusakan Jaringan Irigasi	Sarana dan prasarana Daerah irigasi kewenangan provinsi sebagian besar dalam kondisi rusak
			Belum lengkapnya sistem jaringan irigasi dan akibat kejadian bencana alam.
			Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai)
			Penggunaan air irigasi cenderung boros karena rendahnya efisiensi
			Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia belum memadai, menyebabkan rendahnya Kinerja Operasi dan pemeliharaan (OP)
			Kapasitas kinerja kelembagaan pengelola irigasi dan partisipasi masyarakat petani belum optimal
			Pengelolaan Aset dalam Pengembangan dan pengelolaan irigasi masih belum optimal
			Alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi
		Pelaksanaan OP yang belum optimal	pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi belum seluruhnya disosialisasikan dan diterapkan sesuai manual OP
			Manual OP belum seluruhnya tersedia
			Kurangnya kesiapan kelembagaan dan personil pelaksana Operasi dan Pemeliharaan (OP)
			Angka Kebutuhan Nyata OP (AKNOP) belum sepenuhnya tersedia
			Keterbatasan penganggaran kegiatan OP belum sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP)
		Keterpaduan Pengelolaan Irigasi belum Optimal	Kurang optimalnya koordinasi antara instansi, antar pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten) dan pemilik kepentingan
			Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi masih rendah.
			Kelembagaan pengelola irigasi belum Optimal
			Ketidakpastian pendanaan yang berkelanjutan.
			Akurasi dan pembaharuan Pengelolaan data dan informasi irigasi masih kurang
			Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian/keterampilan yang cukup dalam mendukung
B	SUNGAI, PANTAI, AIR BAKU		
1	Sistim Informasi SDA belum maksimal	Belum optimalnya penyediaan data SDA yang akurat, benar, berkelanjutan, tepat waktu dan mudah diakses	Sebaran pos pos hidrologi di seluruh WS kewenangan provinsi belum sesuai dengan hasil rasionalisasi.
			Peralatan Hidrologi kurang memadai.
			Kurangnya pembiayaan pemeliharaan pos hidrologi
			Meningkatnya intensitas penggunaan air, pencemaran air, banjir dan tanah longsor
		Keterbatasan Sumber Daya dan Teknologi	Kurangnya pelaksanaan pelatihan atau OJT untuk para petugas hidrologi dan staf pengolah data SDA
			Pembaharuan dan kontiunitas Data SIH3 tidak terintegrasi & terpadu

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Kerusakan tebing sungai dan abrasi pantai	Masih banyaknya sungai yang kondisinya kritis.	Seringnya terjadi bencana alam dan kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai).
		Masih banyaknya Pantai yang kondisinya kritis.	Terjadinya bencana abrasi pantai. Beralih fungsi pemanfaatan sempadan pantai.
3	Masih banyaknya daerah yang belum mendapatkan akses air baku	- Terbatasnya sumber air Baku yang bisa dikelola	- Minimnya Infrastruktur Air Baku yang terbangun. - Kurang Optimalnya pengelolaan Infrastruktur Air Baku yang sudah terbangun.
			Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian Sumber air baku.
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
A	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
1	Masih kurangnya Regulasi Daerah dalam mendukung NSPK Bidang Air Minum	Belum terarahnya Penyelenggaraan SPAM di Provinsi dan Kab/Kota.	Belum tersusunnya Perda tentang Penyelenggaraan SPAM di Provinsi Sulawesi Tengah dan Belum tersusunnya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Provinsi.
		Belum optimalnya pemenuhan SPM bidang Air Minum di Kawasan Lintas Kab/Kota	Belum tersusunnya Dokumen Perencanaan RISPAM Lintas Kab/Kota
2	Masih tingginya angka prefelensi penyakit (sistomiasis, Stunting)	Belum optimalnya infrastruktur SPAM	-Keterbatasan wilayah kewenangan provinsi hanya di pemenuhan kebutuhan air minum di kawasan Lintas Kab/Kota. -Kurangnya porsi penganggaran pembangunan infrastruktur SPAM. -Belum tersedianya dokumen perencanaan SPAM.
3	belum terkelola dan terpeliharanya Infrastruktur SPAM yang telah dibangun diluar wilayah kewenangan Provinsi  Infrastruktur SPAM yang telah dibangun belum termanfaatkan dengan baik	Sebagian Infrastruktur SPAM yang dibangun berada diluar wilayah kewenangan Provinsi	- Perubahan regulasi setelah infrastruktur SPAM terbangun, sehingga tidak memiliki dasar hukum dalam pengusulan penganggaran untuk pengelolaannya.  -Kurangnya pemahaman stakeholder terkait kewenangan penyelenggaraan SPAM Provinsi, -Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengelola dan memelihara SPAM terbangun dan -Kurang / tidak adanya kelompok masyarakat pengelola SPAM terbangun.
		Belum dilakukan serah terima aset ke pemerintah daerah Kab/Kota	Penyerahan aset belum mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi (OPD)
4	Masih kurangnya pemenuhan penerapan SPM Bidang Air Minum di Kab/Kota	Pemenuhan Air Minum belum menjadi prioritas utama dalam pemenuhan SPM kepada masyarakat	Stakeholder (Pemerintah daerah) belum memahami tugas wajib dalam rangka pemenuhan SPM untuk masyarakat sebagaimana amanat UUD 1945
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan provinsi dalam mengawal pemenuhan penerapan SPM di Kab/Kota	Belum adanya data base tentang akses air minum ditingkat Provinsi dan Kab/Kota, serta Alokasi anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan penerapan SPM relatif rendah
5	Terbatasnya Sumber air baku permukaan untuk Air minum	Sumber air baku permukaan untuk air minum perkotaan mengalami pencemaran	Manajemen limbah domestik, industri dan pertanian belum optimal
		Keterbatasan Sumber air baku permukaan untuk air minum di perdesaan	- tidak memiliki Sumber Air Baku - terjadi kerusakan DAS
6	Belum optimalnya Kinerja SPAM PASIGALA	Belum beroperasinya SPAM Pasigala sejak terjadinya Bencana Alam Gempa Bumi 28 September 2018	Belum selesainya proses kajian dan perencanaan perbaikan SPAM Regional PASIGALA
			Belum tersedianya anggaran untuk pengadaan lahan
			Belum adanya Nota Kesepakatan yang baru
			Kurangnya ketersediaan anggaran untuk biaya Operasional dan Pemeliharaan SPAM yang beroperasi mengalami penurunan fungsi akibat kurangnya kapasitas pengelola



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
A	AIR LIMBAH (SANITASI)		
1	Masih tingginya angka penyakit yang disebabkan sanitasi buruk	Rendahnya akses dan kualitas pengelolalan sanitasi (air limbah) layak dan aman	- Belum tersedianya Dokumen Kebijakan dan Strategis Daerah Provinsi tentang Sistem Pengelolaan Sanitasi. - Belum tersedianya dokumen perencanaan Teknis Sistem Pengelolaan Sanitasi pada Provinsi Sulawesi Tengah.
			- Kelembagaan yang belum efektif dan efisien pada pengelolaan sanitasi. - Lemahnya Pengawasan NSPK Sistem Pengelolaan Sanitasi.
			Kurangnya kegiatan Pendampingan dan sosialisasi pengelolaan sanitasi kepada masyarakat.
			- Terbatasnya wilayah kewenangan provinsi (Regional) dalam menangani sektor sanitasi. - belum adanya komitmen pemerintah provinsi dengan pemerintah kab/kota dalam hal kerja sama penanganan sanitasi (Regional).
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
A	Persampahan		
	Masih tingginya timbulan sampah domestik yang belum tertangani	Masih rendahnya layanan dan kualitas pengelolaan sampah domestik	Dokumen Kebijakan dan Strategis Daerah Provinsi tentang Sistem Pengelolaan persampahan yang belum tersedia.
			Dokumen perencanaan sistem pengelolaan persampahan Kewenangan Provinsi belum tersedia
			- Lemahnya Pengawasan NSPK Sistem Pengelolaan persampahan - Kelembagaan belum efektif dan efisien.
			- Terbatasnya pendanaan pembangunan infrastruktur pengelolaan persampahan. - Kurangnya kegiatan sosialisasi pengelolan persampahan kepada masyarakat.
			- Belum adanya kesepakatan Wilayah kewenangan Provinsi (Regional) dalam menangani sektor persampahan.
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
A	Drainase		
	Masih tingginya potensi genangan di kawasan permukiman	Belum optimalnya infrastruktur sistem drainase permukiman	Belum terdapatnya Dokumen Kebijakan dan Strategis Daerah Provinsi tentang Sistem Pengelolaan Drainase
			Belum terdapatnya dokumen perencanaan sistem drainase permukiman sesuai kewenangan
			Pengawasan NSPK Sistem Pengelolaan Drainase yang masih lemah
			- Keterbatasan wilayah kewenangan provinsi dalam menangani sektor drainase.
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
A	Bangunan Gedung		
1	Perancangan, Pembangunan, Kajian dan pemeliharaan bangunan gedung negara belum tertib.	- Sebagian besar Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara belum sepenuhnya berpedoman pada NSPK.	- Belum tersedianya peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Provinsi - Kurangnya sosialisasi yang mendukung kegiatan penetapan dan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Provinsi - Kurangnya pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Pengelola Teknis
	Bangunan Gedung Negara banyak yang tidak berfungsi	- Banyak Bangunan negara yang rusak akibat bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi	- DED Bangunan Gedung Negara belum mengikuti SNI kegempaan - terbatasnya pendanaan dalam rehab rekon bangunan gedung negara
	Tumpang tindihnya program penyelenggaraan kegiatan penataan lingkungan permukiman	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan Penataan Lingkungan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait penyelenggaraan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Kurang terpeliharanya bangunan Gedung Negara yang mempengaruhi kepentingan masyarakat baik milik pemerintah maupun BUMN/Yayasan	Belum adanya peraturan yang mengatur tentang Penetapan Bangunan Gedung Negara untuk keperluan Strategis Provinsi	keterbatasan anggaran untuk menyusun Perda/Pergub bangunan Gedung Negara
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
A	Perencanaan Bangunan Dan Lingkungannya		
	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Provinsi	A. Masih terbatasnya pengelola teknis yang memiliki sertifikasi dalam membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraaan Bangunan Gedung B. Kurangnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengusulan anggaran penyelenggaraan Bangunan Gedung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis  C. Banyaknya Bangunan Gedung Negara yang terbengkalai dan tidak terawat, mengalami kerusakan akibat kondisi cuaca dan umur bangunan  D. Belum adanya pemeliharaan/perawatan Bangunan Cagar Budaya	a. Diklat yang dilakukan oleh BPSDM Pusat masih terbatas dalam hal kuota
			b. Minimnya anggaran dalam penyelenggaraan Diklat Pengelola Teknis
			a. Kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sulawesi Tengah
			b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Non teknis tidak melibatkan Pengelola Teknis dalam pengusulan Anggaran Biaya Pembangunan Bangunan Gedung
			a.Terbatasnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan pemeliharaan berkala
			b. Terbatasnya anggaran pemeliharaan berkala di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
			a. Belum adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus yang menangani Bangunan Cagar Budaya
			b. Terbatasnya anggaran pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya
8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
A	Jalan Lingkungan		
1	Tumpang tindihnya program penyelenggaraan kegiatan Penataan Jalan Lingkungan	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan Penataan Jalan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	- Data base infrastruktur jalan lingkungan beserta kelengkapannya belum tersedia. - Kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait penyelenggaraan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

#### Visi :

#### **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulteng Tahun 2005-2025, maka pada periode IV RPJMD Tahun 2021-2026 pembangunan di Sulteng ditujukan untuk mewujudkan **masyarakat Sulteng yang Maju, Damai, Sejahtera dan mandiri** melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

**Gerak Cepat** dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat.

**Lebih Sejahtera** dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai.

Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi, sosial serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman.

**Lebih maju** merupakan Gambaran dari kondisi suatu masyarakat

yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, kearah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Adapun **Misi** yang akan diemban selama lima tahun ke depan yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Adapun program prioritas meliputi:

- a. Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitive bencana berwujud *cash for work* berbasis pada Korban Bencana maupun *cash for work* di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi seperti Kasimbar-Tambu, Tayawa-

Kolonodale, Mensung-Pasir Putih, Balingara-Toili Barat, Sigi-Poso, Mamosalato-Toili;

- b. Mendirikan Sekolah Vokasional (Kejuruan);
- c. Menyediaan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyangga bagi ibukota baru;
- d. Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Analisis Renstra K/L (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD provinsi terhadap sasaran Renstra K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing OPD. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan PERATURAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024.

#### **3.3.1. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)**

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan:

**“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden” :**

**“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

#### **3.3.2. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian



sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### 3.3.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Kementerian PUPR yang ingin diwujudkan.

#### **Tujuan :**

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

### **Sasaran Strategis :**

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
  - (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
  - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
  - (3) Kapasitas tampung per kapita;
  - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
  - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
  - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
  - (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;

- (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
- 5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
  - (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
  - (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
  - (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
  - (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
  - (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
  - (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

**Tabel 3.3.**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR**  
**Tahun 2020-2024**

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air
2.	Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan

	yang layak dan aman menuju terwujudnya <i>smart living</i> , dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Terjangkau
4.	Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional
5.	Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, menempatkan pembangunan keCipta-karya dan sumber daya air terutama untuk mendukung Misi Kepala daerah yaitu ***Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah***. Guna mendukung Visi Kepala Daerah dalam mewujudkan ***masyarakat Sulteng yang Maju, Damai, Sejahtera dan mandiri***. Didalam Program Prioritas Unggulan Kemasyarakatan dimana pada bidang sumber daya air yaitu Program Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana lainnya untuk mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan jaringan pengairan Lainnya;
2. Terpenuhinya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
3. Berkurangnya Daerah Rawan Banjir dan Daerah Rawan Abrasi Pantai.

4. Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
5. Meningkatkan akses sanitasi layak dan aman Untuk menjamin keselamatan manusia dan lingkungan, sekarang dan yang akan datang akibat limbah.
6. Menjaga agar tidak terjadi kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu kawasan akibat air permukaan.
7. Memelihara bangunan gedung milik pemerintah dan bangunan bersejarah.

Ditinjau dari sasaran Renstra OPD maupun Provinsi maka faktor-faktor penghambat atau pun faktor-faktor pendorong dari pembangunan sumber daya air yang mempengaruhi permasalahan pelayanannya adalah :

1. Faktor Penghambat

- Alokasi dana yang terbatas;
- Duplikasi kegiatan dengan sektor pertanian;
- Ketersediaan air menjadi kritis disebabkan kerusakan hutan;
- Kesadaran Masyarakat Masih Rendah
- Kelembagaan kurang optimal
- Penambangan liar.
- Lemahnya koordinasi
- Data yang belum akurat

2. Faktor Pendorong

- Kebijakan Pemerintah;
- Program dan Kegiatan;
- Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan bidang Cipta Karya dan sumber daya air.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang (UU 24/1992), yang kemudian



diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh Undang-Undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, Produktif dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik dikawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Provinsi Sulawesi Tengah secara geografis mempunyai posisi yang strategis, karena diapit oleh dua provinsi di sebelah utara (Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara) dan tiga Provinsi di sebelah selatan (Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan), dan secara administratif luas Wilayah Sulawesi Tengah adalah 68.033,00 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 13 Kabupaten/satu kota. Posisi yang strategis dengan wilayah yang cukup luas ini merupakan potensi yang harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, agar dapat memberikan kontribusi bagi daerah maupun masyarakat Sulawesi Tengah khususnya. Namun demikian infrastruktur yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ditambah banyaknya bencana alam yang berakibat pada menurunnya kondisi infrastruktur yang ada terutama infrastruktur bidang sumber daya air, bidang jalan jembatan, bidang sarana prasarana perumahan dan pemukiman.

Peran KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam

perencanaan tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan Analisis, mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah.

Jika ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategi maka faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanannya adalah :

1. faktor penghambat

- faktor yang menjadi penghambat dalam kaitannya dengan pelayanan OPD adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan tata ruang serta penetapan tata ruang yang tidak sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan dilapangan.

2. Faktor yang menjadi pendorong

- Faktor yang menjadi pendorong dalam kaitannya dengan pelayanan OPD adalah adanya kepastian tata ruang kemudahan OPD dalam mengalokasikan kegiatan.

### **3.5 Penentuan Isu – isu Strategis OPD**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan Karena

dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan analisis terhadap isu strategis dalam upaya menciptakan pelayanan public dan mewujudkan visi dan misi RPJMD dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Isu Strategis pada OPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Aspek	Isu Strategis
1.	Fungsional jaringan irigasi	<div><div></div><ul style="list-style-type: none"><li>- Luas lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya air</li><li>- Degradasi lahan irigasi akibat alih fungsi lahan</li><li>- Peningkatan rasio lahan budidaya yang terairi oleh jaringan irigasi dan peningkatan kemampuan petani untuk mengelola sumber daya air.</li><li>- Masih terdapat jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi rusak</li><li>- Adanya potensi rawan banjir limpahan yang disebabkan daerah aliran sungai yang cukup luas dengan debit yang cukup besar.</li></ul></div>
2.	Rumah Tangga pengguna air minum dan sanitasi	<div>Belum terpetakannya wilayah rawan air baku dan wilayah yang dilayani oleh system penyedia air minum</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan cakupan pengguna air minum pada masyarakat perdesaan yang ketersediaan air bakunya terbatas dan belum terjangkau</li></ul></div>

		<p>oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum pada berbagai program</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Upaya perlindungan sumber air baku dan terhindar dari pencemaran lingkungan.</li><li>- Akses pelayanan sanitasi dan air limbah domestik masih harus dikembangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</li></ul>
3.	System drainase	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kapasitas sistem drainase terutama di perkotaan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini</li><li>- Diperlukan master plan penanganan drainase yang terintegrasi.</li></ul>



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Berdasarkan isu-isu strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dalam jangka menengah, adalah sebagai berikut :

A. Tujuan Jangka Menengah Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi, Pelayanan dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang inovatif dan kolaboratif;
3. Terwujudnya Efisiensi dan efektifitas Pengelolaan keuangan guna mendukung Kemandirian Fiskal Daerah;
4. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pembangunan Infrastruktur Daerah.

B. Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
2. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien;
3. Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas instansi Pemerintah;
4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA) baku dan sungai guna mencegah terjadinya banjir;
5. Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan air minum;
6. Meningkatnya pengelolaan air Limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas;
7. Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman.



Sasaran (1). Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD, sasaran (2). Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien serta sasaran (3).

diuraikan pada Tabel 4.1. Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas instansi Pemerintah mengacu pada indikator “Presentase kualitas perencanaan dan penganggaran SKPD”.

Sasaran (4). Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA) baku dan sungai guna mencegah terjadinya banjir mengacu pada indikator “Presentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Air Baku dan Sungai guna mencegah terjadinya banjir”.

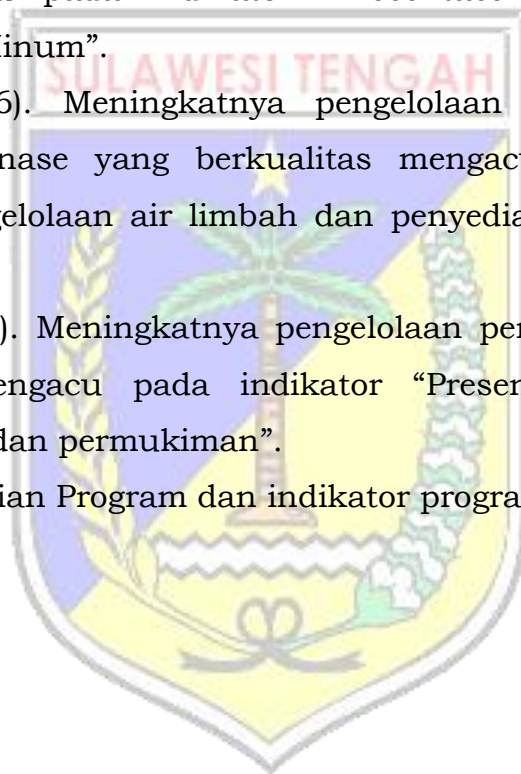
Sasaran (5). Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan air minum mengacu pada indikator “Presentase Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum”.

Sasaran (6). Meningkatnya pengelolaan air Limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas mengacu pada indikator “Presentase Pengelolaan air limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas”.

Sasaran (7). Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman mengacu pada indikator “Presentase pengelolaan penataan ruang dan permukiman”.

Untuk rincian Program dan indikator program terurai pada

**Tabel 4.1**



**Tabel 4.1 (Tabel T-C.25)**  
**Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan**  
**Perangkat Daerah "Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah"**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah</b>								
	<b>Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya dan Sumber Daya Air</b>		Indeks Infrastruktur Keciptakarya dan Sumber Daya Air	<b>0,601</b>	<b>0,687</b>	<b>0,773</b>	<b>0,907</b>	<b>1,000</b>
<b>1</b>		<b>Meningkatnya Infrastruktur Keciptakarya</b>	Presentase Infrastruktur Keciptakarya	<b>16,28%</b>	<b>18,01%</b>	<b>20,99%</b>	<b>26,04%</b>	<b>28,84%</b>
1,1		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota.	44,08%	45,42%	51,50%	55,08%	57,00%
			Persentase Penduduk Berakses Air Minum	15,38%	15,53%	15,60%	30,46%	30,53%
1,2		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh spal regional	16,67%	17,05%	17,81%	18,95%	20,47%
			Presentase rumah tinggal bersanitasi	0,078%	0,093%	0,102%	0,109%	0,115%
1,3		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah	15,38%	23,08%	30,77%	38,46%	46,15%
1,4		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Luas daerah genangan yang tertangani	3,89%	4,07%	4,25%	4,43%	4,61%
1,5			Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Provinsi)	3,55%	4,56%	5,91%	7,09%	8,31%
1,6		Program Pengembangan Permukiman	Persentase penanganan infrastruktur di KSP	21,89%	23,67%	26,37%	37,25%	41,70%
1,7		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan strategis provinsi yang dilakukan penataan	23,33%	26,67%	33,33%	40,00%	46,67%
1,8		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan strategis provinsi serta penataan lingkungan di KSP	18,57%	20,00%	24,29%	28,57%	32,86%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2		Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	Presentase Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	16,81%	19,79%	21,58%	24,06%	26,39%
2,1		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	34,20%	35,12%	35,30%	36,05%	36,76%
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	17,10%	25,14%	29,77%	36,58%	42,35%
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi	12,28%	13,91%	14,92%	15,93%	17,44%
			Presentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi	3,66%	4,99%	6,32%	7,66%	8,99%
Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM								
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Government)		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62	64	66	68	70,75
		Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62	64	66	68	70,75



# DINAS CIPTA KARYA & SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH

## CASCADING/ POHON KINERJA

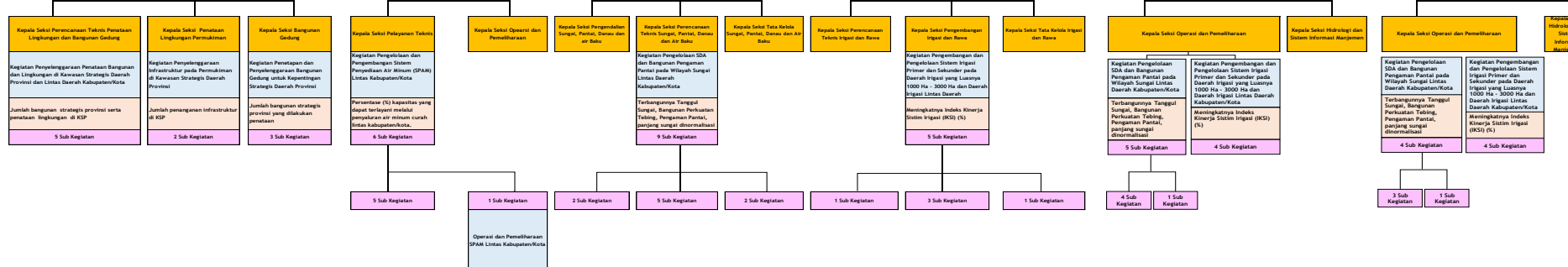
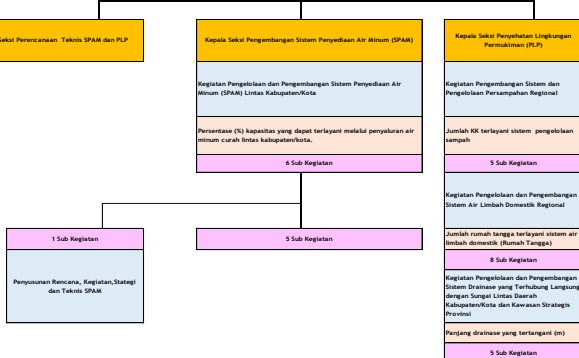
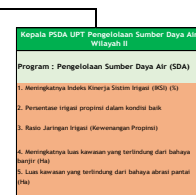
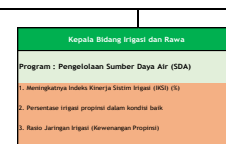
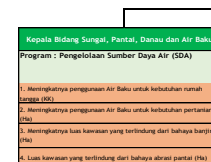
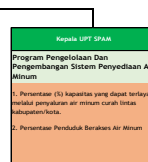
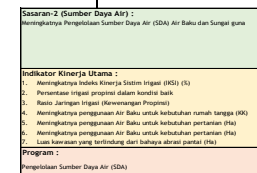
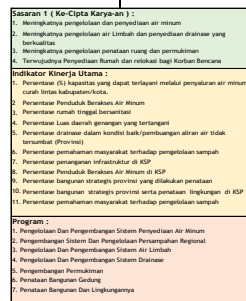
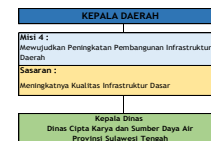
CIKASDA PROVINSI SULAWESI TENGAH



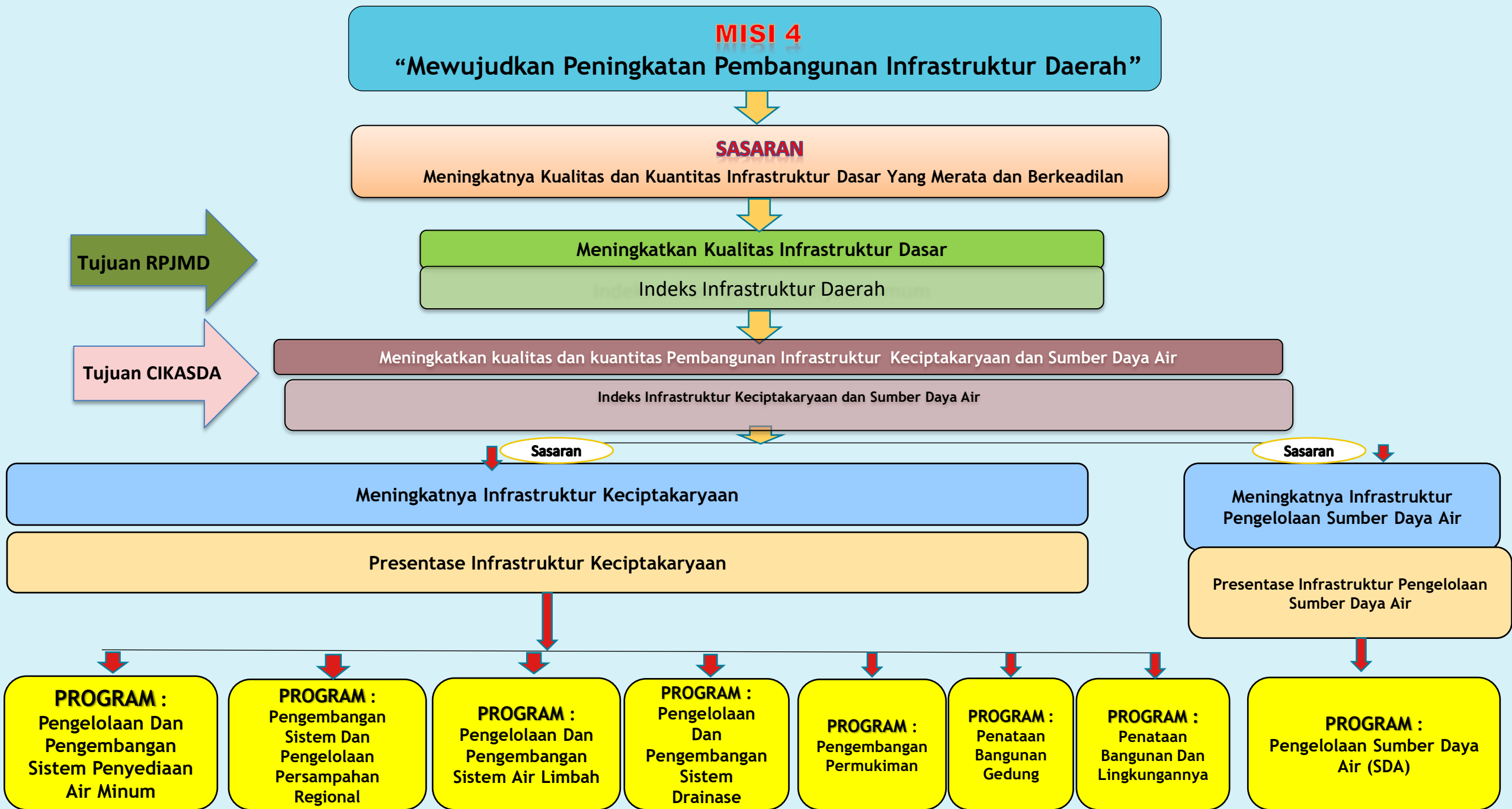


# DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH

## TAHUN 2021







## Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

URUSAN  
KECIPTAKARYAAN

- Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota.
- Persentase Penduduk Berakses Air Minum

### Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

Jumlah Kumulatif (Liter/detik) Kapasitas yang dapat terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota

#### 4 SUB KEGIATAN (BIDANG AMPL)

<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</b>	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)
<b>Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM</b>	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi SPAM Regional (Dokumen)
<b>Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan</b>	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik)
<b>Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota</b>	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Ha)

#### 6 SUB KEGIATAN (UPT SPAM)

<b>Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan</b>	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Regional (SR)
<b>Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM (Kab/Kota)
<b>Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi</b>	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota)
<b>Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota</b>	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara (unit)
<b>Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)
<b>Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Badan Usaha Pengelola SPAM yang dibentuk (Badan Usaha)

## Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Persentase pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah

### Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi (Rumah Tangga)

#### 5 SUB KEGIATAN (BIDANG AMPL)

<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun (Dokumen)
<b>Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi (Dokumen)
<b>Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi (Rumah Tangga)
<b>Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)
<b>Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan</b>	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Kelompok Masyarakat)

## Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh spal regional
- Presentase rumah tinggal bersanitasi

### Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Domestik (Unit)

#### 8 SUB KEGIATAN

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen)
Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan (Unit)
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Rumah Tangga)
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Dokumen)
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (Kelompok Masyarakat)
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah personil yang mendapatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik (orang)
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara (unit)

## Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

- Persentase Luas daerah genangan yang tertangani
- Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Provinsi)

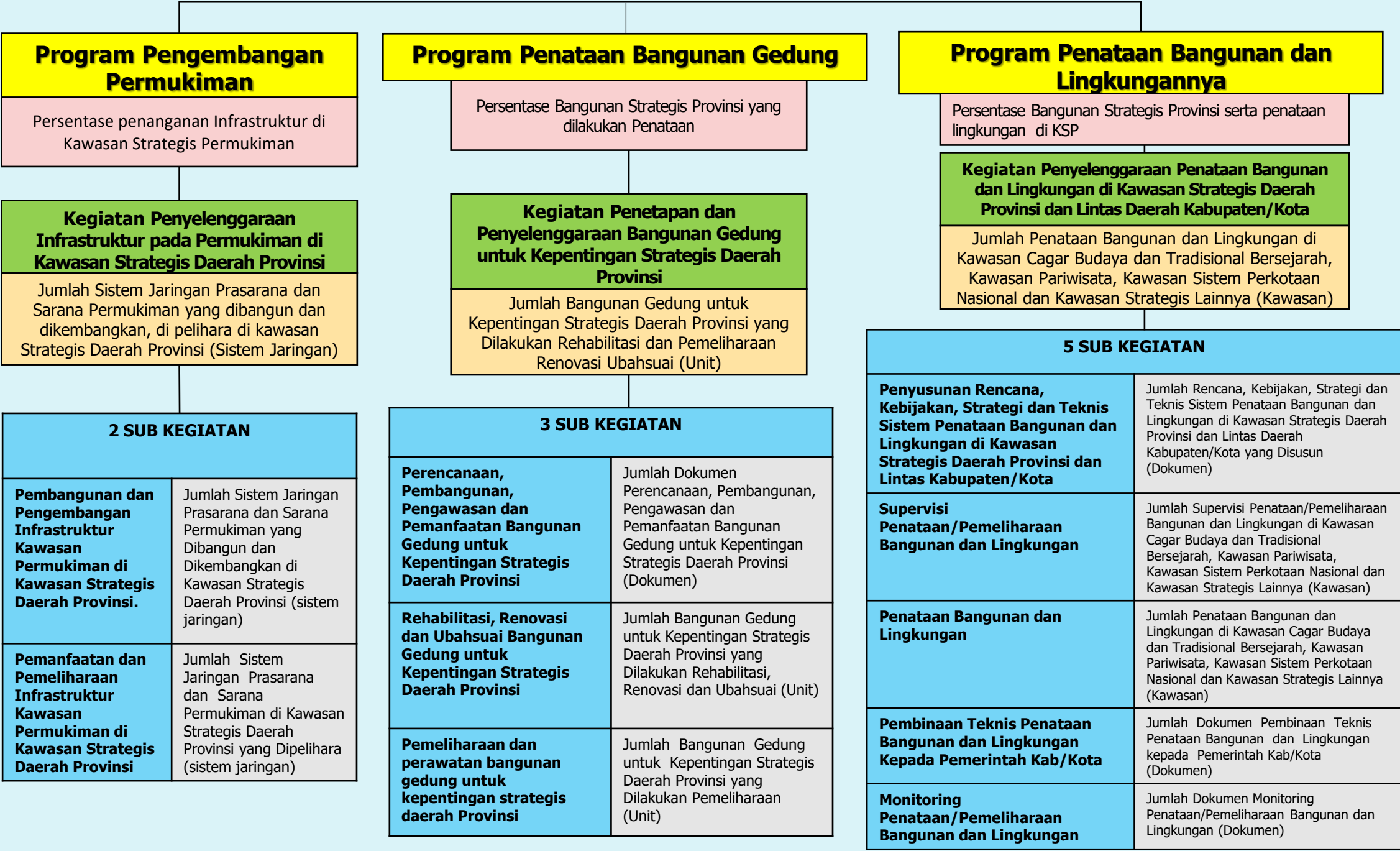
### Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi

Jumlah Sistem Drainase perkotaan yang disediakan, yang beroperasi dan terpelihara (Unit)

#### 5 SUB KEGIATAN

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)
Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan (orang)
Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (unit)
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)

URUSAN  
KECIPTAKARYAAN



# Program Pengelolaan Sumber Daya Air

## URUSAN SUMBER DAYA AIR

**Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi**  
**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir**  
**Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi**  
**Presentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi**

### Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Luas Kawasan Permukiman sepanjang Pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan Provinsi (HA)

8 Sub Kegiatan (Bidang Sungai Pantai)		3 Sub Kegiatan (UPT PSDA WIL. I)		3 Sub Kegiatan (UPT PSDA WIL. II)	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai (Dokumen)	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (meter)	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang di Normalisasi/Restorasi (meter)
Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun (KM)	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara (meter)	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (meter)
Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul sungai (meter)	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (dokumen)	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara (meter)
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing (meter)			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (dokumen)
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (meter)				
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sunga yang diNormalisasi/Restorasi (meter)				
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (lembaga)				
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)				

### Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

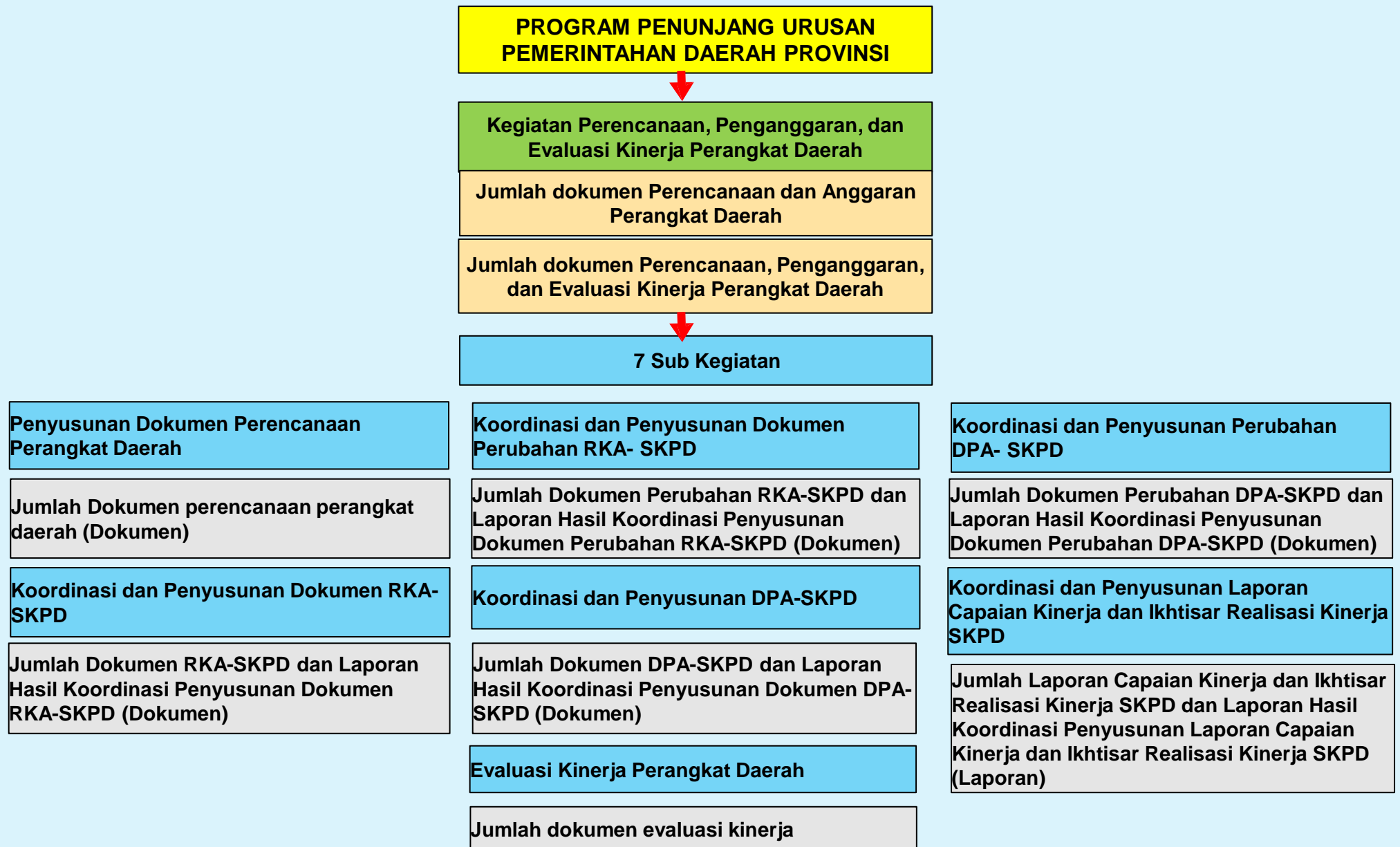
Presentase Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Kewenangan Provinsi dalam Kondisi baik

7 Sub Kegiatan (Bidang Irwa)		4 Sub Kegiatan (UPT PSDA WIL. I)		4 Sub Kegiatan (UPT PSDA WIL. II)	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (dokumen)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (meter)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (meter)
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (meter)	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (bendung)	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (bendung)
Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (bendung)	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan (unit)	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan (unit)
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Bertambahnya Luas Areal Layanan (Daerah Irigasi)	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (DI)	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (DI)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (meter)				
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (bendung)				
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlatihnya Petugas/Staf Pengelola OP Irigasi dan P3A/GP3A/IP3A serta meningkatnya kapasitas kelembagaan Irigasi dan Rawa (kegiatan)				



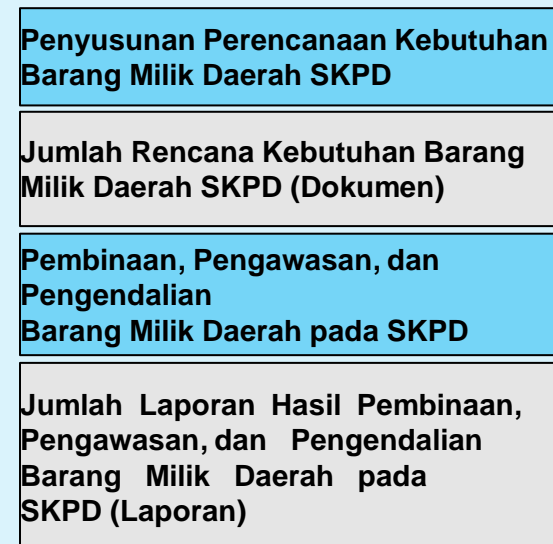
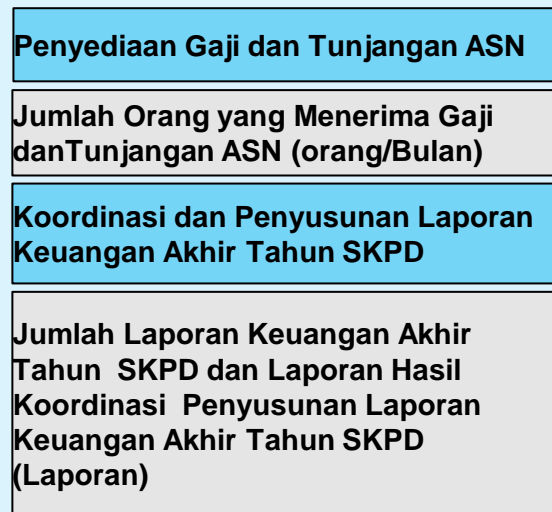
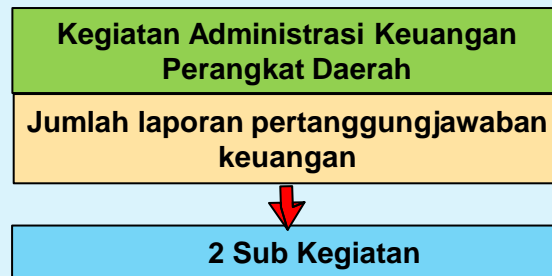


# CASCADING KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR



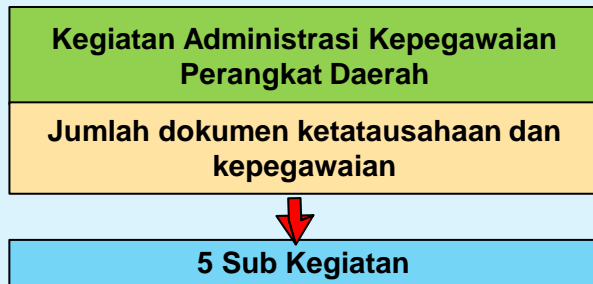


# CASCADING KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR





# CASCADING KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR



**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)

**Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian**

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)

**Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**

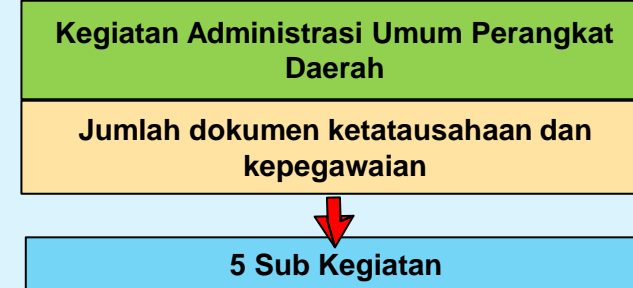
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)

**Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)

**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)



**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)

**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)

**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)

**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diisediakan (Paket)

**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)



# CASCADING KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**



**4 Sub Kegiatan**

**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

**Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)**

**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

**Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)**

**Pengadaan Mebel**

**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)**

**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)**

**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**



**3 Sub Kegiatan**

**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)**

**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)**

**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)**

**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**



**5 Sub Kegiatan**

**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)**

**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

**Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara**

**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)**

**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)**

**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

**Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)**



# CASCADING KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

**Kegiatan Administrasi Umum  
Perangkat Daerah (UPT PSDA  
WILAYAH 1)**

**Jumlah Laporan Penyediaan Barang  
dan Jasa**



**3 Sub Kegiatan**

**Penyediaan Peralatan dan  
Perlengkapan Kantor**

**Jumlah Paket Peralatan dan  
Perlengkapan Kantor yang disediakan  
(Paket)**

**Penyediaan Barang Cetak dan  
Penggandaan**

**Jumlah Paket Barang Cetak dan  
Penggandaan yang Disediakan (Paket)**

**Penyelenggaraan Rapat  
Koordinasi dan Konsultasi  
SKPD**

**Jumlah Laporan  
Penyelenggaraan Rapat  
Koordinasi dan Konsultasi  
SKPD (Laporan)**

**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah  
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik  
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah  
Daerah**



**1 Sub Kegiatan**

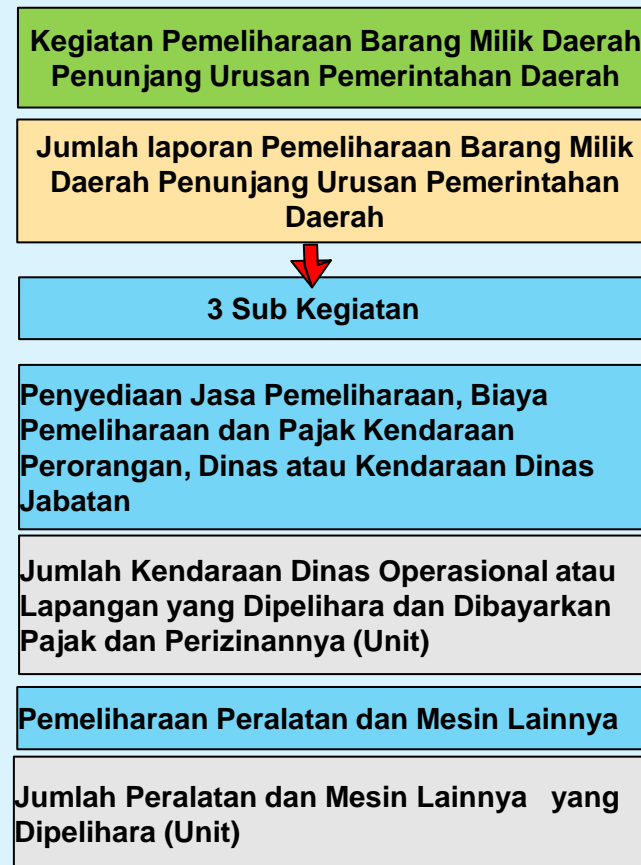
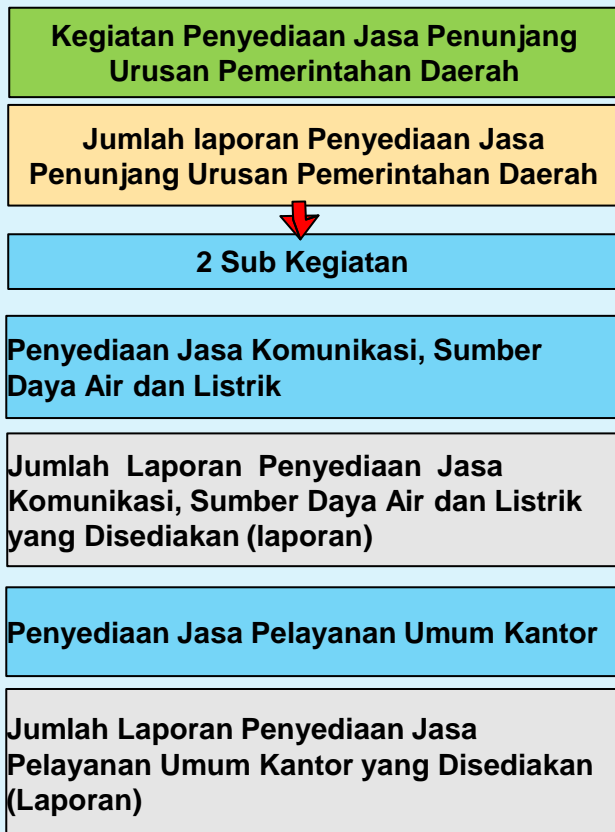
**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas  
atau Kendaraan Dinas Jabatan**

**Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung  
Kantor atau Bangunan Lainnya yang  
Disediakan (Unit)**





# CASCADING KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR



Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)



# CASCADING KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT PSDA WILAYAH 2)**

**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**



**5 Sub Kegiatan**

**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)**

**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)**

**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)**

**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

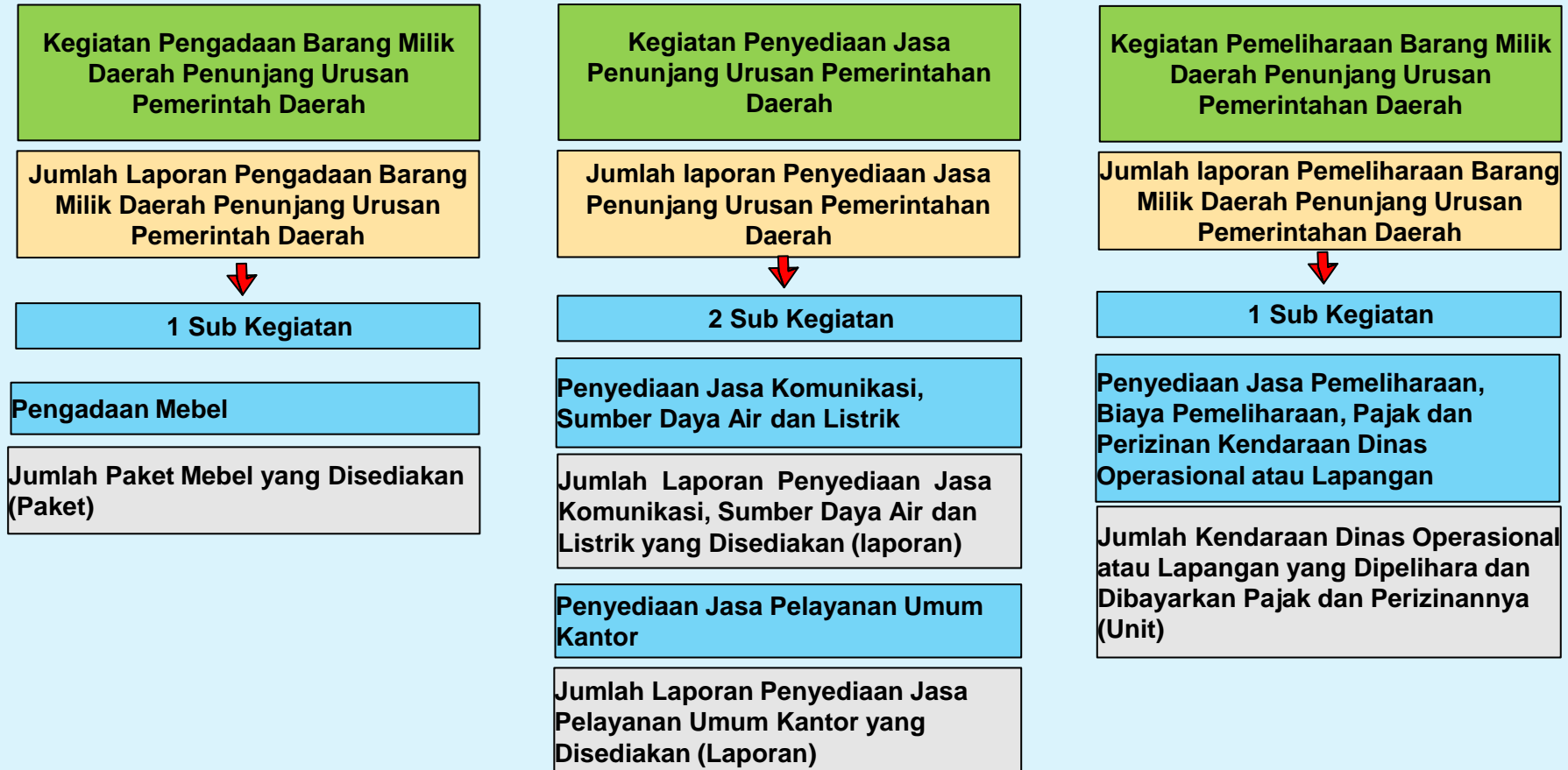
**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)**

**Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

**Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)**



# CASCADING KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR





# CASCADING KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT SPAM)**

**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**



**5 Sub Kegiatan**

**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)**

**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)**

**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)**

**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)**

**Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

**Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)**

**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**



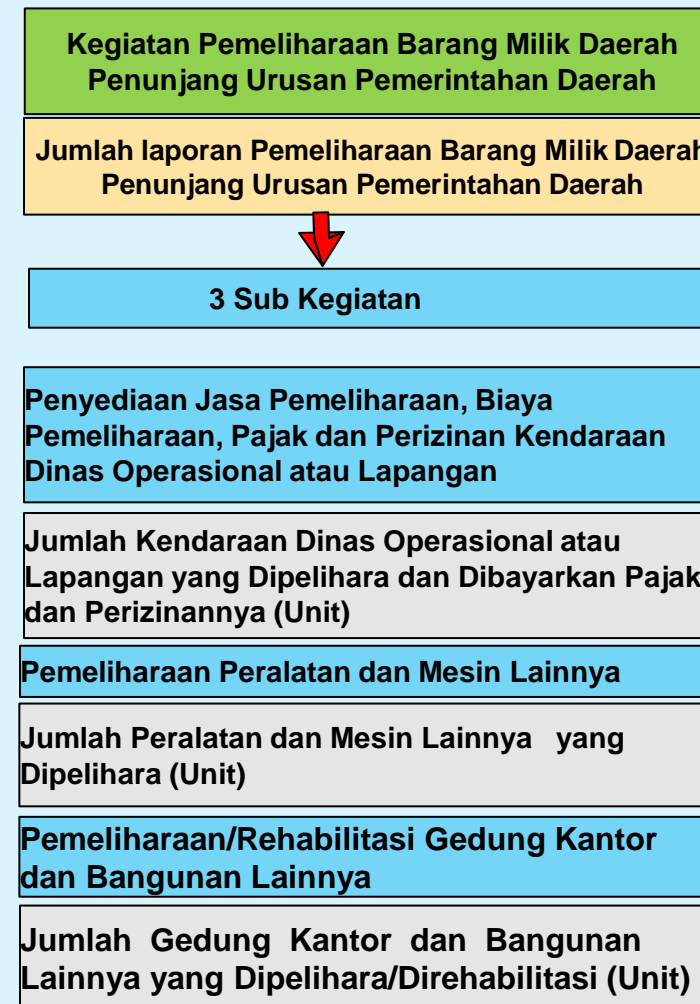
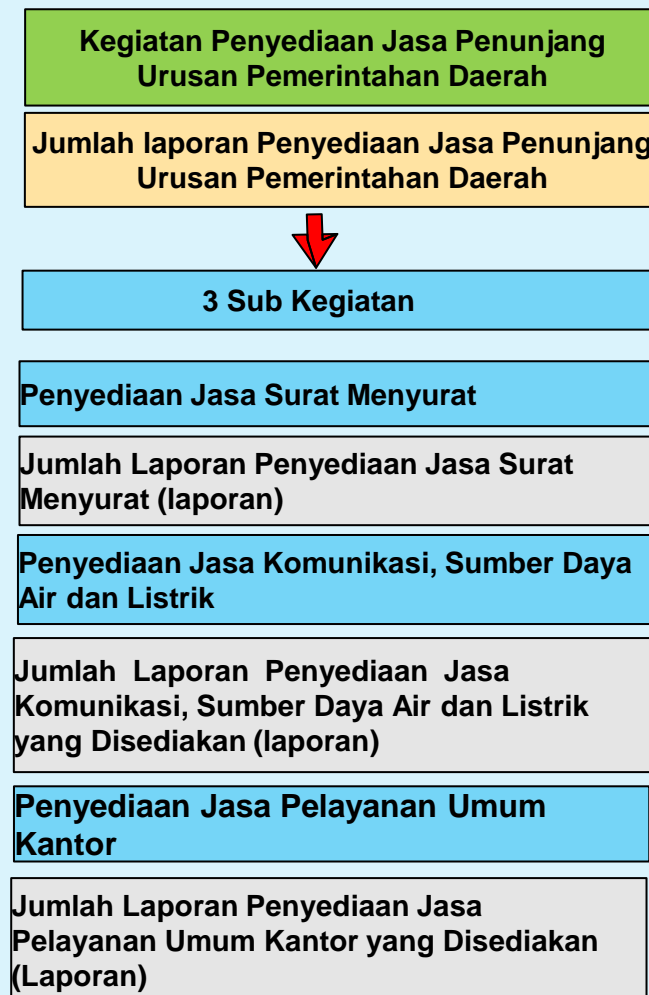
**1 Sub Kegiatan**

**Pengadaan Mebel**

**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)**



# CASCADING KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR





## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Dengan menggunakan pendekatan strategik manajemen sistem dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan diperlukan suatu strategi operasional yang meliputi pembinaan pegawai, koordinasi, pemantapan kelembagaan, pengendalian program dan jaminan mutu konstruksi. Untuk maksud tersebut ditetapkan strategi, berikut:

- 
- a. Peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Regional, maupun Kabupaten/Kota, dan stakeholder lainnya, dengan tujuan terciptanya keterbukaan dan demokratisasi dalam proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keciptakarya dan sumber daya air di Sulawesi Tengah serta sosialisasi bagi aparat terkait, dengan alat ukur strategisnya adalah pertemuan koordinasi dan sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan keciptakarya dan sumber daya air.
  - b. Peningkatan penyelenggaraan pemenuhan infrastruktur permukiman pada sektor air minum dan sanitasi layak dan aman
  - c. Peningkatan Pengelolaan keciptakarya dengan tujuan meningkatkan kondisi dan fungsi sarana dan prasarana keciptakarya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
  - d. Peningkatan penyelenggaraan pengembangan sistem pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian serta tata kelola organisasi infrastruktur keciptakarya yang berkelanjutan.

- e. Pembentukan dan peningkatan kelembagaan pengelola infrastruktur keciptakarya
- f. Peningkatan Pengelolaan sumber daya air, dengan tujuan meningkatkan kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber air dari kerusakan lingkungan yang mengakibatkan meningkatnya bahaya erosi dan sedimentasi serta terancamnya kelestarian sumber daya air untuk mewujudkan sistem informasi SDA yang terpadu, dan terpusat. Alat ukur strategisnya adalah upaya pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sungai, infrastruktur sistem pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
- g. Melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air dengan memperhatikan keserasian antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah dengan pengelolaan kebutuhan dan pasokan, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.
- h. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi lima tahun kedepan difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi yang mengalami kerusakan, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan.
- i. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemanfaat air baku permukaan untuk berbagai keperluan, dengan tujuan pendayagunaan sumber air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna serta terkendali.
- j. Pengendalian keberlanjutan fungsi infrastruktur dari daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir yang mengutamakan pendekatan non konstruksi.

- k. Konservasi sumber daya air dan pengelolaan Daerah. Aliran Sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis. Pengamanan pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi dan jalur-jalur strategis.
- l. Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dengan cara membentuk/memperkuat Lembaga Dewan Sumber Dayai Air dan Komisi Irigasi
- m. Peningkatan peran modal social dalam pengelolaan sumber daya air terutama dalam mendorong rasa memiliki dari masyarakat pengguna air, yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur.
- n. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dengan didukung ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakses secara mudah oleh pihak-pihak yang memerlukan. Untuk itu diperlukan kegiatan seperti : penataan dan penguatan sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan.

## 5.2. Kebijakan

Dalam konteks kebijakan pembangunan keciptakaryaan dan sumber daya air di daerah tidak terlepas dari kebijakan Nasional secara makro, untuk itu khususnya dalam kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang saat ini belum optimal

kualitasnya sehingga sangat mempengaruhi kemampuan pengelolaan air dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun arah kebijakan bidang keciptakaryaanc mencakup antara lain Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman, Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman, Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman.

Reformasi pengelolaan sumber daya air sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Reformasi pengelolaan sumber daya air bertujuan agar pengelola, petani pemakai air dan penerima manfaat air lainnya, mampu efisien serta berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

Implementasi Pengelolaan sumber daya air kedepan harus menempatkan capacity building dalam tahapan strategis. Capacity building merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan yang menitik beratkan pada kemampuan pemerintah agar dapat mewujudkan good governance, yang bercirikan : (1). memiliki kapasitas menjalankan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah yang lain (2) akuntabel dan transparan mengambil keputusan; (3) partisipasi dalam proses demokrasi (4) peduli terhadap kemiskinan dan pemerataan (5) memiliki komitmen terhadap ekonomi yang berorientasi pasar. Adapun komponen-komponen yang harus dikembangkan dalam Capacity Building antara lain : (1) Kapasitas individu masyarakat (dimensi aparat), (2) kapasitas kelembagaan (dimensi teknologi) (3) kapasitas modal yang diwujudkan dalam bentuk sumber daya sarana dan prasarana (dimensi fisik) yang dalam hal ini didesain untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan, mendorong partisipasi masyarakat, mendorong tumbuh kembangnya sektor swasta dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar.

Dalam upaya mendukung dan mendorong upaya percepatan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi operasional, diperlukan rencana tindak (action plan) berupa kebijakan program/kegiatan pembangunan Keciptakarya dan Sumber Daya Air, sebagai berikut :

**A. Sekretaris**

1. Meningkatkan dan mengembangkan sarana aparatur Negara.
2. Meningkatkan kualitas karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

**B. Kebijakan di Bidang Cipta Karya**

1. Meningkatkan Penyediaan air minum bagi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan jaringan perpipaan baru pada daerah-daerah kritis atau belum terjangkau pelayanan yang memiliki potensial sumber air, serta pendekatan teknologi tepat guna pada daerah yang tidak memiliki potensi sumber air.
2. Mengupayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap penyediaan air minum, melalui penyusunan program pembiayaan yang efektif dan terjangkau.
3. Penyusunan kebijakan dan strategi bidang keciptakarya.
4. Melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan prioritas seperti : Kawasan Strategis Provinsi (KSP), kawasan industri, kawasan stunting, kawasan schistosomiosis, kawasan daerah tertinggal dan lain-lain.
5. Melaksanakan rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik regional dalam upaya mewujudkan lingkungan masyarakat yang sehat dan bebas ancaman penyakit.
6. Melakukan penyusunan kebijakan sistem drainase perkotaan yang diharapkan akan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan.



7. Pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase dengan harapan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan limbah dan drainase.
8. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan bagi kepentingan strategis daerah khususnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memacu kemajuan daerah.
9. Mewujudkan pengelolaan sampah pada kawasan regional melalui penyusunan rencana dan strategi pengelolaan persampahan membangun, merehabilitasi dan meningkatkan TPA/TPST/SPA serta penyediaan sarana dan prasarana maupun fasilitasi kerjasama persampahan lintas kabupaten/kota.

#### **C. Kebijakan di bidang Sumber Daya Air**

1. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air berdasarkan :
  - a. Keserasian antara konservasi dan pendayagunaan
  - b. Keserasian antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah;
  - c. Keserasian antara pengelolaan kebutuhan dan pasokan;
  - d. Keserasian antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang
2. Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi lima tahun kedepan difokuskan kepada :
  - a. Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun
  - b. Daerah-daerah irigasi yang jaringan irigasinya rehabilitasi
  - c. Daerah-daerah irigasi guna peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan yang diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat.

3. Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dan air permukaan. Peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang diselenggarakan dengan berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta mulai dari proses perencanaan sampai dengan tahap evaluasi pelaksanaan guna mewujudkan pengelolaan sumber daya air secara partisipatif khususnya dibidang irigasi.
5. Konservasi sumber daya air dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan. Pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi dan jalur-jalur strategis.
6. Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparat terkait tentang sumber daya air serta melaksanakan rapat koordinasi tentang sumber daya air pada tingkat local dan regional.



7. Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dengan cara membentuk/memperkuat lembaga Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi.
8. Peningkatan peran modal social dalam pengelolaan sumber daya air terutama dalam hal mendorong rasa memiliki dari masyarakat pengguna air yang merupakan faktor penting untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur.
9. Melaksanakan pengembangan sumber daya air dengan didukung ketersediaan data yang tepat, akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak terkait. Untuk itu diperlukan kegiatan seperti penataan dan penguatan system pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan




Tabel 5.1

## Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2021-2026 Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen Perangkat Daerah (RKA, DPA)</li> <li>b. Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD secara berkala</li> </ul>
2.	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara konsisten dan komprehensif</li> </ul>
3.	Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah	Melakukan perumusan kebijakan dan Pendampingan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan</li> <li>b. Koordinasi dan monitoring pencegahan dan pemberantasan korupsi</li> </ul>
4.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Meningkatkan Koordinasi dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penyusunan belanja daerah sesuai dengan program prioritas daerah</li> <li>b. Melaksanakan rasionalisasi dalam perencanaan penganggaran daerah</li> </ul>
		Meningkatkan Penatausahaan, Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan standarisasi Barang milik daerah</li> <li>b. Optimalisasi penggunaan dan pengamanan barang milik daerah</li> </ul>

5.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA) baku dan sungai guna mencegah terjadinya banjir	Meningkatkan penyediaan pengaman pantai, bendungan, Irigasi dan penyediaan air baku	 <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengamanan pantai</li> <li>b. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bendungan dan sejenisnya</li> <li>c. Pengelolaan penyediaan air baku</li> <li>d. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder</li> <li>e. Mengoptimalkan Koordinasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa</li> </ul>
6.	Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan air minum	Meningkatkan system penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota	 <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas SDM</li> <li>b. Menyelenggarakan pembinaan teknis, pelatihan, sosialisasi kepada Pemda Kab/Kota dan masyarakat</li> <li>c. Penyusunan kebijakan dan strategi sistem penyediaan air minum</li> <li>d. Pembangunan jaringan perpipaan baru dan pemeliharaan SPAM</li> <li>e. Peningkatan jaringan SPAM</li> <li>f. Perluasan jaringan SPAM</li> <li>g. Memfasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM</li> <li>h. Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan Pengelolaan SPAM</li> <li>i. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Penyediaan Air Minum</li> </ul>
7.	Meningkatnya pengelolaan air Limbah dan penyedian drainase yang berkualitas	Meningkatkan Pengelolaan Sistem Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas SDM</li> <li>b. Menyelenggarakan pembinaan teknis, pelatihan, sosialisasi kepada Pemda</li> </ul>



				<p>Kab/Kota dan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Penyusunan kebijakan dan strategi sistem pengelolaan air limbah</li> <li>d. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional</li> <li>e. Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/ Kota</li> </ul>
		Meningkatkan penyediaan drainase dan sarana pendukungnya		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Kebijakan Sistem drainase perkotaan</li> <li>b. Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan drainase</li> <li>c. Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase</li> </ul>
8.	Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman	Meningkatkan penyediaan infrastruktur permukiman dan penataan bangunan di Kawasan strategis		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan infrastruktur kawasan strategis daerah</li> <li>b. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan bagi kepentingan strategis daerah</li> </ul>

## BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Adapun Program Prioritas yang menjadi rencana kerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang.

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;**

Melaksanakan 20 (dua puluh) kegiatan yang tersebar di Sekretariat Dinas dan Tata Usaha UPT Wilayah I, UPT Wilayah II dan UPT SPAM.

B. Program Teknis.

**1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda);**

Melaksanakan 2 (dua) kegiatan pada Bidang Irigasi dan Rawa, Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku; UPT PSDA Wilayah I dan UPT PSDA Wilayah II.

**2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;**

Melaksanakan 1 (satu) kegiatan pada Bidang Air Minum Penyehatan Lingkungan dan UPT SPAM.

**3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;**

Melaksanakan 1 (satu) kegiatan pada Bidang Air Minum Penyehatan Lingkungan.

**4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;**

Melaksanakan 1 (satu) kegiatan pada Bidang Air Minum Penyehatan Lingkungan.

**5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;**

Melaksanakan 1 (satu) kegiatan pada Bidang Air Minum Penyehatan Lingkungan.

**6. Program Pengembangan Permukiman;**

Melaksanakan 1 (satu) kegiatan pada Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung.

**7. Program Penataan Bangunan Gedung;**

Melaksanakan 1 (satu) kegiatan pada Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung.

**8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;**

Melaksanakan 1 (satu) kegiatan pada Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung.

Program prioritas tersebut beserta Kegiatan dan Sub Keegiatannya terurai pada **Tabel 6.1 :**



Tabel 6.1 (Tabel T-C.27)  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 2021-2026  
Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

NO. KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				190.741.030.000		174.688.939.999		195.129.200.000		238.985.040.000		284.579.507.000		284.579.507.000
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				58.865.420.000		62.936.410.000		68.885.960.000		84.422.220.000		99.495.790.000		99.495.790.000
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	33,19%	34,20 %	31.747.757.665	35,12 %	45.108.303.800	35,30 %	46.810.713.799	36,05 %	47.752.548.235	36,76 %	54.347.387.305	36,76 %	54.347.387.305
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	15,00%	17,10 %	21.238.173.400	25,14 %	12.648.905.700	29,77 %	16.696.045.701	36,59 %	28.438.182.830	42,35 %	34.766.913.760	42,35 %	34.766.913.760
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi	10,00%	12,28 %	4.201.278.435	13,91 %	2.500.990.000	14,92 %	2.700.990.000	15,93 %	5.553.278.435	17,44 %	7.703.278.435	17,44 %	7.703.278.435
		Presentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi	1,81%	3,66 %	1.678.210.500	4,99 %	2.678.210.500	6,32 %	2.678.210.500	7,66 %	2.678.210.500	8,99 %	2.678.210.500	8,99 %	2.678.210.500
1.03.02.101	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Luas Kawasan Permukiman sepanjang Pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan Provinsi (HA)		-	27.117.662.335		17.828.106.200		22.075.246.201	-	36.669.671.765	-	45.148.402.695	-	45.148.402.695
03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai (Dokumen)		20	1.681.234.000	28	1.000.000.000	36	2.500.000.000	32	2.681.234.000	38	2.681.234.000	38	2.681.234.000
08	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun (KM)		55	1.678.210.500	75	2.678.210.500	95	2.678.210.500	115	2.678.210.500	135	2.678.210.500	135	2.678.210.500
09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (Meter)		2254,8	8.077.860.000	2550	4.077.860.000	2887	5.500.000.000	3000	10.077.860.000	4500	13.106.600.360	4500	13.106.600.360
10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun (meter)		1070,6	878.513.750	1570	878.513.750	1970	878.513.750	1988	878.523.180	3460	878.513.750	3460	878.513.750
18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (meter)		4500	2.350.990.000	4800	1.350.990.000	5200	1.550.990.000	5500	3.350.990.000	6000	5.350.990.000	6000	5.350.990.000
46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (meter)		3050,5	4.833.280.000	3489,5	2.375.246.300	3889,5	2.500.246.301	3920	6.833.280.000	5535	7.833.280.000	5535	7.833.280.000
61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (lembaga)		2	572.991.650	2	372.991.650	2	372.991.650	2	572.991.650	2	572.991.650	2	572.991.650
63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)		2	594.294.000	2	394.294.000	2	394.294.000	2	594.294.000	2	594.294.000	2	594.294.000
UPT PSDA WILAYAH 1															
53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (meter)		105	800.000.000	210	1.000.000.000	210	1.500.000.000	250	2.000.000.000	300	3.000.000.000	300	3.000.000.000
59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara (meter)		352	1.000.288.435	700	800.000.000	700	800.000.000	800	1.352.288.435	900	1.352.288.435	900	1.352.288.435
60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (dokumen)		27	750.000.000	27	350.000.000	28	350.000.000	29	750.000.000	30	750.000.000	30	750.000.000
UPT PSDA WILAYAH 2															
46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi (meter)		200	1.500.000.000	2000	1.000.000.000	2500	1.500.000.000	5000	2.500.000.000	2500	2.500.000.000	2500	2.500.000.000

NO. KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)
53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (meter)		100	1.000.000.000	150	850.000.000	350	850.000.000	350	1.000.000.000	500	2.000.000.000	500	2.000.000.000
59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara (meter)		17	850.000.000	15	350.000.000	15	350.000.000	15	850.000.000	15	1.000.000.000	15	1.000.000.000
60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (dokumen)		34	550.000.000	34	350.000.000	34	350.000.000	34	550.000.000	34	850.000.000	34	850.000.000
1.03.02.102	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Kewenangan Provinsi dalam Kondisi baik		-	31.747.757.665	-	45.108.303.800	-	46.810.713.799	-	47.752.548.235	-	54.347.387.305	-	54.347.387.305
01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (dokumen)		6	2.100.000.000	8	3.350.896.508	9	3.350.896.508	10	5.065.156.420	12	5.100.000.000	12	5.100.000.000
02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (meter)		89934	5.364.553.750	91434	7.241.127.158	2	8.704.524.421	3	8.364.553.750	93934	9.924.549.240	93934	9.924.549.240
03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (bendung)		-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	3	-
08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (meter)		0	-	1000	1.940.358.603	1000	1.940.358.603	2000	-	3000	1.000.000.000	3000	1.000.000.000
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (meter)		15975	3.626.063.275	1117,5	7.980.973.351	3376,71	8.080.973.351	4876,71	5.626.063.275	5876,71	6.626.063.275	5876,71	6.626.063.275
15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (bendung)		3	4.128.644.650	3	8.081.229.497	3	9.081.229.497	4	8.168.278.800	4	9.168.278.800	4	9.168.278.800
21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlatihnya Petugas/Staf Pengelola OP Irigasi dan P3A/GP3A/IP3A serta meningkatnya kapasitas kelembagaan Irigasi dan Rawa (kegiatan)		17	1.500.000.000	18	3.410.537.905	19	2.000.000.000	20	3.500.000.000	22	3.500.000.000	22	3.500.000.000
UPT PSDA WILAYAH 1															
21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (meter)		47,186	4.366.907.556	47,186	3.862.086.000	47,186	3.862.086.000	47,186	5.366.907.556	47,186	6.366.907.556	47,186	6.366.907.556
22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (bendung)		15	1.547.702.690	15	2.136.798.000	15	2.536.798.000	15	1.547.702.690	15	1.547.702.690	15	1.547.702.690
27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan (unit)		15	676.089.850	15	516.519.000	15	591.294.321	15	676.089.850	15	676.089.850	15	676.089.850
28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (DI)		15	769.300.000	15	599.550.000	15	599.550.000	15	769.300.000	15	769.300.000	15	769.300.000
UPT PSDA WILAYAH 2															
21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (meter)		48.094	4.687.576.204	48.094	3.355.093.198	48.094	3.355.093.198	48.094	5.687.576.204	48.094	6.687.576.204	48.094	6.687.576.204
22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (bendung)		15	1.547.702.690	15	1.550.092.080	15	1.550.092.080	15	1.547.702.690	15	1.547.702.690	15	1.547.702.690
27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan (unit)		15	649.677.000	15	374.192.500	15	448.967.820	15	649.677.000	15	649.677.000	15	649.677.000
28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (DI)		15	783.540.000	15	708.850.000	15	708.850.000	15	783.540.000	15	783.540.000	15	783.540.000



NO. KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)
II  1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				15.669.310.000		10.514.100.000		11.508.030.000		14.103.500.000		16.621.680.000		16.621.680.000
		Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota.	40%	44,08 %	14.176.372.201	45,42 %	8.664.100.000	51,50 %	9.398.030.000	55,08 %	11.430.562.201	57,00 %	13.921.680.000	57,00 %	13.921.680.000
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum	15.38%	15,38%	1.492.937.799	15,53%	1.850.000.000	15,60%	2.110.000.000	30,46%	2.672.937.799	30,53%	2.700.000.000	30,53%	2.700.000.000
1.03.03.101	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Kumulatif (Liter/detik) Kapasitas yang dapat terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah lintas Kabupaten/ Kota			15.669.310.000	-	10.514.100.000	-	11.508.030.000	-	14.103.500.000	-	16.621.680.000	-	16.621.680.000
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)		8	2.500.000.000	7	5.000.000.000	8	2.100.000.000	6	2.500.000.000	6	3.000.000.000	6	3.000.000.000
02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional (Dokumen)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik)		12,5	9.000.000.000	12,5	1.464.100.000	12,5	4.100.000.000	12,5	7.360.062.201	12,5	8.000.000.000	12,5	8.000.000.000
11	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Ha)		302,0	1.200.000.000	305	1.750.000.000	306	2.000.000.000	606	2.500.000.000	606,5	2.700.000.000	606,5	2.700.000.000
	UPT SPAM														
06	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Regional (SR)		12	1.000.000.000	15	1.604.450.000	16,5	2.542.925.000	18	1.000.000.000	19,5	1.292.939.747	19,5	1.292.939.747
07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM (Kab/Kota)		5	192.937.799	5	50.000.000	6	55.000.000	6	100.000.000	7	0	7	0
08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota)		0	-	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	0	1	0
09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara (unit)		240	1.559.000.000	245	394.900.000	280	434.390.000	300	359.000.000	310	1.537.240.253	310	1.537.240.253
10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)		5	100.000.000	5	50.000.000	5	55.000.000	6	72.937.799	6	-	6	-
12	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Pengelola SPAM yang dibentuk (Badan Usaha)		8	117.372.201	10	100.650.000	11	110.715.000	12	91.500.000	13	91.500.000	13	91.500.000
III 1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah	0%	15,38%	208.210.000	23,08%	151.570.000	30,77%	165.900.000	38,46%	203.310.000	46,15%	239.610.000	46,15%	239.610.000
1.03.04.101	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi (Rumah Tangga)			208.210.000		151.570.000	-	165.900.000	-	203.310.000	-	239.610.000	-	239.610.000
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun (Dokumen)		-	-	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi (Dokumen)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi (Rumah Tangga)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	208.210.000	1	51.570.000	1	115.900.000	1	153.310.000	1	189.610.000	1	189.610.000
08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Kelompok Masyarakat)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO. KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)
IV  1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				623.830.000		863.880.000		945.540.000		1.158.800.000		1.365.700.000		1.365.700.000
		Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh spal regional	0,00%	16,67 %	248.830.000	17,05 %	248.830.000	17,81 %	248.830.000	18,95 %	246.484.003	20,47 %	248.830.000	20,47 %	248.830.000
		Presentase rumah tinggal bersanitasi	0,060%	0,078 %	375.000.000	0,093 %	615.050.000	0,102 %	696.710.000	0,109 %	912.315.997	0,115 %	1.116.870.000	0,115 %	1.116.870.000
1.03.05.101	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Domestik (Unit)		500	375.000.000	600	615.050.000	660	696.710.000	700	912.315.997	740	1.116.870.000	740	1.116.870.000
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen)		-	-	1	50.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan (Unit)		2	248.830.000	2	248.830.000	2	248.830.000	2	246.484.003	2	248.830.000	2	248.830.000
03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Rumah Tangga)		300	300.000.000	350	166.220.000	380	197.880.000	400	365.831.994	420	536.137.305	420	536.137.305
05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Dokumen)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (Kelompok Masyarakat)		1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	56.902.695	1	56.902.695
07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah personil yang mendapatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik (orang)		-	-	-	-	1	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	-	-	-	1	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara (unit)		200	50.000.000	250	100.000.000	280	100.000.000	300	100.000.000	320	100.000.000	320	100.000.000
V  1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				9.494.050.000		8.263.120.000		9.044.250.000		11.084.060.000		13.063.120.000		13.063.120.000
		Persentase Luas daerah genangan yang tertangani	3,71%	3,89%	4.000.000.000	4,07%	2.000.000.000	4,25%	2.500.000.000	4,43%	3.000.000.000	4,61%	4.000.000.000	4,61%	4.000.000.000
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Provinsi)	0,37%	3,55%	5.494.050.000	4,56%	6.263.120.000	5,91%	6.544.250.000	7,09%	8.084.060.000	8,31%	9.063.120.000	8,31%	9.063.120.000
1.03.06.101	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Drainase perkotaan yang disediakan, yang beroperasi dan terpelihara (Unit)		444	5.494.050.000	571	6.263.120.000	739	6.544.250.000	887	8.084.060.000	1.040	9.063.120.000	1.040	9.063.120.000
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)		1	800.000.000	1	350.000.000	1	440.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000
02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)		1	350.000.000	1	250.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan (orang)		1	350.000.000	1	350.000.000	1	100.000.000	1	228.000.000	1	283.599.999	1	283.599.999
04	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (unit)		15	3.644.050.000	20	4.813.120.000	25	5.004.250.000	30	5.806.060.000	40	6.479.520.001	40	6.479.520.001
06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)		429	350.000.000	551	500.000.000	714	500.000.000	857	750.000.000	1.000	1.000.000.000	1.000	1.000.000.000

NO. KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)
<b>VI</b> <b>1.03.0</b> <b>7</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Penanganan Infrastruktur di Kawasan Strategis Permukiman</b>	<b>20%</b>	<b>21,89%</b>	<b>40.040.820.000</b>	<b>23,67%</b>	<b>17.458.140.000</b>	<b>26,37%</b>	<b>19.108.500.000</b>	<b>37,25%</b>	<b>23.418.150.000</b>	<b>41,70%</b>	<b>27.599.460.000</b>	<b>41,70%</b>	<b>27.599.460.000</b>
<b>1.03.07.</b> <b>101</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</b>	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang dibangun dan dikembangkan, di pelihara di kawasan Strategis Daerah Provinsi (Sistem Jaringan)		-	40.040.820.000	-	17.458.140.000	-	19.108.500.000	-	23.418.150.000	-	27.599.460.000	-	27.599.460.000
01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (sistem jaringan)		150	26.270.377.000	110	15.270.377.000	150	17.000.000.000	200	20.000.377.000	250	22.255.377.000	250	22.255.377.000
02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara (sistem jaringan)		507	13.770.443.000	600	2.187.763.000	641	2.108.500.000	918	3.417.773.000	1.001	5.344.083.000	1.001	5.344.083.000
<b>VII</b> <b>1.03.0</b> <b>8</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase bangunan strategis provinsi yang dilakukan penataan</b>	<b>20,36%</b>	<b>23,33%</b>	<b>27.058.310.000</b>	<b>26,67%</b>	<b>37.457.180.000</b>	<b>33,33%</b>	<b>40.998.110.000</b>	<b>40,00%</b>	<b>50.244.660.000</b>	<b>46,67%</b>	<b>59.215.837.000</b>	<b>46,67%</b>	<b>59.215.837.000</b>
<b>1.03.08.</b> <b>101</b>	<b>Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Renovasi Ubahsuai (Unit)		-	27.058.310.000	-	37.457.180.000	-	40.998.110.000	-	50.244.660.000	-	59.215.837.000	-	59.215.837.000
01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)		3	24.058.310.000	3	35.457.180.000	3	38.000.000.000	3	47.244.660.000	3	54.000.000.000	3	54.000.000.000
02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai (Unit)		2	3.000.000.000	3	2.000.000.000	4	2.998.110.000	5	3.000.000.000	6	5.215.837.000	6	5.215.837.000
03	Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)		2	3.000.000.000	2	2.000.000.000	3	2.998.113.342	4	3.000.000.000	5	5.215.837.737	5	5.215.837.737
<b>VIII</b> <b>1.03.0</b> <b>9</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase bangunan strategis provinsi serta penataan lingkungan di KSP</b>	<b>16,00%</b>	<b>18,57%</b>	<b>4.149.590.000</b>	<b>20,00%</b>	<b>2.678.610.000</b>	<b>24,29%</b>	<b>2.931.820.000</b>	<b>28,57%</b>	<b>3.593.050.000</b>	<b>32,86%</b>	<b>4.234.590.000</b>	<b>32,86%</b>	<b>4.234.590.000</b>
<b>1.03.09.</b> <b>101</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)		-	4.149.590.000	-	2.678.610.000	-	2.931.820.000	-	3.593.050.000	-	4.234.590.000	-	4.234.590.000
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)		13	132.299.000	14	2.000.000.000	17	2.185.355.000	20	2.403.890.500	23	2.785.827.000	23	2.785.827.000
02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)		2	150.000.000	3	200.000.000	4	220.000.000	5	242.000.000	6	266.200.000	20	266.200.000
03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)		2	3.469.934.000	3	85.124.000	4	93.636.400	5	471.048.500	5	558.841.000	19	558.841.000
06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota (Dokumen)		13	247.357.000	13	193.486.000	13	212.828.600	13	234.111.000	13	357.522.000	13	357.522.000
07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)		1	150.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	5	266.200.000

NO. KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)
IX  01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang tercapai	78,20%	100%	34.631.490.000	100%	34.365.930.000	100%	41.541.090.000	100%	50.757.290.000	100%	62.743.720.000	100%	62.743.720.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat ( <i>customer/stakeholder</i> )	50	77		79		82		85		88		88	
		Nilai SAKIP Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	71,97	74		76		78		80		82		82	
		Persentase Realisasi anggaran	98,46%	98,57%		98,68%		98,78%		98,89%		99,00%		99,00%	
01 101	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah		6	904.146.084	6	800.004.229	6	1.300.000.000	6	1.402.335.004	6	1.762.571.664	30	1.762.571.664
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	485.000.000	5	250.000.000	5	494.705.110	5	631.832.501	5	695.015.752	25	695.015.752
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)		2	200.000.000	2	210.281.686	2	292.070.415	2	375.431.795	2	412.978.135	2	412.978.135
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	224.146.084	1	214.864.611	1	365.331.465	1	331.325.111	1	584.457.622	1	584.457.622
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1	250.000.000	1	138.348.912	1	407.589.920	1	409.402.184	1	450.342.402	1	450.342.402
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	180.000.000	1	189.731.146	1	182.482.860	1	229.574.687	1	252.532.155	1	252.532.155
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1	50.000.000	1	46.777.874	1	52.525.340	1	56.601.228	1	62.261.350	1	62.261.350
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		1	200.000.000	1	100.000.000	1	209.078.688	1	264.973.733	1	291.471.106	1	291.471.106
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		4	285.000.000	4	150.000.000	4	285.626.423	4	366.858.768	4	403.544.645	4	403.544.645
01 102	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan		2	24.554.552.932	2	24.377.925.882	2	28.700.268.006	2	30.678.978.676	2	38.674.360.907	2	38.674.360.907
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (orang/Bulan)		1	24.054.552.932	1	24.054.552.932	1	28.015.383.506	1	30.166.697.406	1	38.110.851.510	1	38.110.851.510
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	500.000.000	1	323.372.950	1	684.884.500	1	512.281.270	1	563.509.396	1	563.509.396
01 103	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		2	282.200.050	2	460.420.055	2	457.200.050	2	575.608.267	2	638.169.093	10	638.169.093
01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	100.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	5	225.000.000
04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	182.200.050	1	310.420.055	1	282.200.050	1	375.608.267	1	413.169.093	5	413.169.093
01 105	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		4	436.368.600	4	488.050.490	4	436.368.600	4	922.594.420	4	1.114.853.862	20	1.114.853.862
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)		-	-	250	100.000.000	250	-	250	226.875.000	250	249.562.500	1.000	249.562.500
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		1	106.322.700	1	100.000.000	1	106.322.700	1	141.515.514	1	255.667.065	5	255.667.065

NO. KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)
05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		1	80.045.900	1	88.050.490	1	80.045.900	1	106.541.093	1	117.195.202	5	117.195.202
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	219.614.780	1	241.576.258	5	241.576.258
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		1	150.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	228.048.033	1	250.852.836	5	250.852.836
01 106	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		5	867.976.945	5	974.314.749	5	1.444.831.590	5	1.747.263.980	5	2.780.403.853	25	2.780.403.853
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	62.982.966	1	69.281.263	1	62.982.966	1	83.830.328	1	92.213.361	5	92.213.361
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)		1	500.000.000	1	500.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.507.020.542	5	1.507.020.542
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)		1	54.993.979	1	60.493.376	1	54.993.979	1	73.196.986	1	180.516.684	5	180.516.684
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	354.843.134	1	741.720.381	5	741.720.381
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	100.000.000	1	194.540.110	1	176.854.645	1	235.393.532	1	258.932.886	5	258.932.886
01 107	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5	1.000.000.000	-	-	-	1.500.000.000	-	-	-	-	5	-
01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		5	1.000.000.000	-	-	-	1.500.000.000	-	-	-	-	5	-
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 108	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13	850.000.000	13	600.000.000	13	1.281.471.256	13	2.010.362.755	13	2.211.399.031	65	2.211.399.031
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)			-		-		-		-		-	-	-
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		12	350.000.000	12	250.000.000	12	531.471.256	12	707.388.241	12	778.127.065	60	778.127.065
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	500.000.000	1	350.000.000	1	750.000.000	1	1.302.974.514	1	1.433.271.965	5	1.433.271.965
01 109	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3	1.384.679.356	3	621.000.000	3	1.384.679.356	3	2.321.403.499	3	3.253.543.849	15	3.253.543.849
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		1	1.000.000.000	1	350.000.000	1	1.000.000.000	1	1.683.053.812	1	1.851.359.194	5	1.851.359.194
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)												-	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	133.994.856	1	121.000.000	1	133.994.856	1	304.688.617	1	735.157.479	5	735.157.479
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	250.684.500	1	150.000.000	1	250.684.500	1	333.661.070	1	667.027.176	5	667.027.176
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)												-	



NO. KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)
	UPT PSDA WILAYAH 1														
01 106	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		2	329.341.697	2	250.000.000	2	258.695.827	2	344.324.145	2	378.756.560	10	378.756.560
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)		1	152.487.052	1	50.000.000	1	81.841.182	1	108.930.613	1	119.823.675	5	119.823.675
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	176.854.645	1	100.000.000	1	176.854.645	1	235.393.532	1	258.932.885	5	258.932.885
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	66.550.000	1	73.205.000	5	73.205.000
01 107	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1	60.000.000	1	62.000.000	1	63.000.000	1	64.550.000	1	70.205.000	5	70.205.000
10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	60.000.000	1	62.000.000	1	63.000.000	1	64.550.000	1	70.205.000	5	70.205.000
01 108	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13	571.848.122	13	550.000.000	13	767.493.992	13	3.407.230.789	13	3.747.953.868	65	3.747.953.868
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		12	71.848.122	12	50.000.000	12	71.848.122	12	95.629.851	12	105.192.836	60	105.192.836
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	500.000.000	1	500.000.000	1	695.645.870	1	3.311.600.938	1	3.642.761.032	5	3.642.761.032
01 109	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3	500.000.000	3	200.000.000	3	500.000.000	3	687.056.304	3	855.761.934	15	855.761.934
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		1	250.000.000	1	100.000.000	1	250.000.000	1	412.056.304	1	453.261.934	5	453.261.934
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		1	100.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	221.000.000	5	221.000.000
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	150.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	5	181.500.000
	UPT PSDA WILAYAH 2														
01 106	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		5	389.341.697	5	428.275.866	5	389.341.697	5	518.213.798	5	570.035.179	25	570.035.179
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	35.000.000	1	38.500.000	1	35.000.000	1	46.585.000	1	51.243.500	5	51.243.500
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)		1	81.841.182	1	90.025.300	1	81.841.182	1	108.930.613	1	119.823.675	5	119.823.675
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)		1	45.645.870	1	50.210.457	1	45.645.870	1	60.754.653	1	66.830.119	5	66.830.119
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)		1	50.000.000	1	55.000.000	1	50.000.000	1	66.550.000	1	73.205.000	5	73.205.000
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	176.854.645	1	194.540.109	1	176.854.645	1	235.393.532	1	258.932.885	5	258.932.885
01 107	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	1	45.000.000	1	47.000.000	1	50.550.000	1	56.205.000	4	56.205.000
05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		-	-	1	45.000.000	1	47.000.000	1	50.550.000	1	56.205.000	4	56.205.000
01 108	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13	581.615.402	13	2.831.205.002	13	1.081.615.402	13	3.425.758.053	13	3.768.333.858	65	3.768.333.858
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		12	81.615.402	12	89.776.942	12	81.615.402	12	108.630.100	12	119.493.110	60	119.493.110
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	500.000.000	1	2.741.428.060	1	1.000.000.000	1	3.317.127.953	1	3.648.840.748	5	3.648.840.748

NO. KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)
01 109	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	277.200.000	1	304.920.000	1	277.200.000	1	368.953.200	1	405.848.520	5	405.848.520
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		1	277.200.000	1	304.920.000	1	277.200.000	1	368.953.200	1	405.848.520	5	405.848.520
	UPT SPAM														
01 106	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		5	227.059.846	5	249.765.831	5	227.059.846	5	302.216.655	5	332.438.321	25	332.438.321
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	25.810.263	1	28.391.289	1	25.810.263	1	34.353.459	1	37.788.805	5	37.788.805
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)		1	60.882.938	1	66.971.231	1	60.882.938	1	81.035.190	1	89.138.709	5	89.138.709
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)		1	3.819.164	1	4.201.080	1	3.819.164	1	5.083.307	1	5.591.638	5	5.591.638
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)		1	87.703.000	1	96.473.300	1	87.703.000	1	116.732.693	1	128.405.962	5	128.405.962
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	48.844.483	1	53.728.931	1	48.844.483	1	65.012.006	1	71.513.207	5	71.513.207
01 107	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)			-		-		-		-		-	-	-
01 108	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14	565.468.269	14	471.887.796	14	565.468.269	14	881.954.233	14	970.149.656	70	970.149.656
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)		1	6.050.000	1	6.655.000	1	6.050.000	1	8.052.550	1	8.857.805	5	8.857.805
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		12	59.418.269	12	65.360.096	12	59.418.269	12	79.085.716	12	86.994.287	60	86.994.287
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	500.000.000	1	399.872.700	1	500.000.000	1	794.815.967	1	874.297.564	5	874.297.564
01 109	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3	364.691.000	3	401.160.100	3	364.691.000	3	416.103.721	3	457.714.093	15	457.714.093
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		1	64.691.000	1	71.160.100	1	64.691.000	1	86.103.721	1	94.714.093	5	94.714.093
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		1	150.000.000	1	165.000.000	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	5	181.500.000
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	150.000.000	1	165.000.000	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	5	181.500.000

## BAB VII

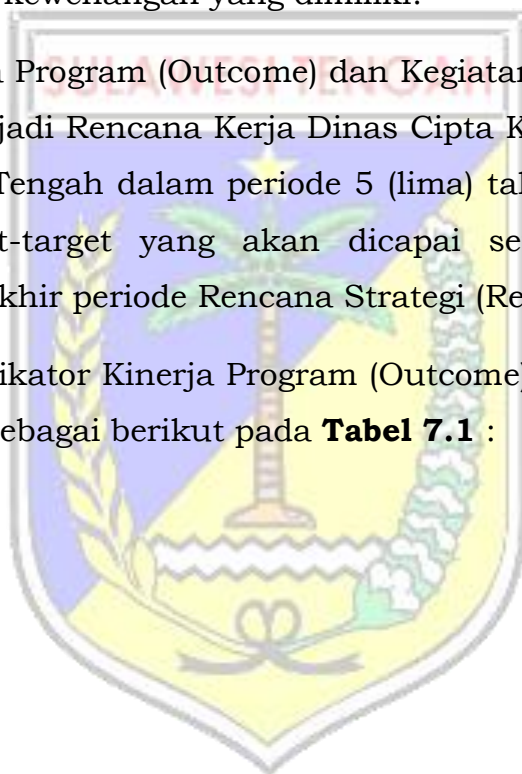
### KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen RPJMD, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja SKPD harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan SKPD yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air berkontribusi untuk mewujudkan seluruh misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) untuk setiap Program Prioritas menjadi Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode 5 (lima) tahun 2021-2026 dengan memperhatikan target-target yang akan dicapai setiap tahunnya hingga Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Strategi (Renstra).

Selanjutnya Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta target Program, sebagai berikut pada **Tabel 7.1** :



Tabel 7.1 (Tabel T-C.28)

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>							
	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	33,19%	34,20 %	35,12 %	35,30 %	36,05 %	36,76 %	36,76 %
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	15,00%	17,10 %	25,14 %	29,77 %	36,59 %	42,35 %	42,35 %
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi	10,00%	12,28 %	13,91 %	14,92 %	15,93 %	17,44 %	17,44 %
	Presentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi	1,81%	3,66 %	4,99 %	6,32 %	7,66 %	8,99 %	8,99 %
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Luas Kawasan Permukiman sepanjang Pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan Provinsi (HA)		-			-	-	-
	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai (Dokumen)		20	28	36	32	38	38
	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun (KM)		55	75	95	115	135	135
	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (Meter)		2254,8	2550	2887	3000	4500	4500
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun (meter)		1070,6	1570	1970	1988	3460	3460
	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (meter)		4500	4800	5200	5500	6000	6000
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (meter)		3050,5	3489,5	3889,5	3920	5535	5535
	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (lembaga)		2	2	2	2	2	2
	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)		2	2	2	2	2	2
	<b>UPT PSDA WILAYAH 1</b>							
	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (meter)		105	210	210	250	300	300
	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara (meter)		352	700	700	800	900	900
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (dokumen)		27	27	28	29	30	30

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>UPT PSDA WILAYAH 2</b>							
	Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi (meter)		200	2000	2500	5000	2500	2500
	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (meter)		100	150	350	350	500	500
	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara (meter)		17	15	15	15	15	15
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (dokumen)		34	34	34	34	34	34
	<b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>							
	<b>Presentase Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Kewenangan Provinsi dalam Kondisi baik</b>		-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (dokumen)		6	8	9	10	12	12
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (meter)		89934	91434	2	3	93934	93934
	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (bendung)		-	-	1	2	3	3
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (meter)		0	1000	1000	2000	3000	3000
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (meter)		15975	1117,5	3376,71	4876,71	5876,71	5876,71
	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (bendung)		3	3	3	4	4	4
	Terlatihnya Petugas/Staf Pengelola OP Irigasi dan P3A/GP3A/IP3A serta meningkatnya kapasitas kelembagaan Irigasi dan Rawa (kegiatan)		17	18	19	20	22	22
	<b>UPT PSDA WILAYAH 1</b>							
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (meter)		47,186	47,186	47,186	47,186	47,186	47,186
	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (bendung)		15	15	15	15	15	15
	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan (unit)		15	15	15	15	15	15
	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (DI)		15	15	15	15	15	15
	<b>UPT PSDA WILAYAH 2</b>							
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (meter)		48.094	48.094	48.094	48.094	48.094	48.094
	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (bendung)		15	15	15	15	15	15
	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan (unit)		15	15	15	15	15	15
	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (DI)		15	15	15	15	15	15



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>							
	Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota.	40%	44,08 %	45,42 %	51,50 %	55,08 %	57,00 %	57,00 %
	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	15.38%	15,38%	15,53%	15,60%	30,46%	30,53%	30,53%
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>							
	<b>Jumlah Kumulatif (Liter/detik) Kapasitas yang dapat terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota</b>			-	-	-	-	-
	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)		8	7	8	6	6	6
	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional (Dokumen)		-	-	-	-	-	-
	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik)		12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Ha)		302,0	305	306	606	606,5	606,5
	<b>UPT SPAM</b>							
	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Regional (SR)		12	15	16,5	18	19,5	19,5
	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM (Kab/Kota)		5	5	6	6	7	7
	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota)		0	1	1	1	1	1
	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara (unit)		240	245	280	300	310	310
	Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)		5	5	5	6	6	6
	Jumlah Badan Usaha Pengelola SPAM yang dibentuk (Badan Usaha)		8	10	11	12	13	13
III	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>							
	Persentase pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah	0%	15,38%	23,08%	30,77%	38,46%	46,15%	46,15%
	<b>Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>							
	<b>Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi (Rumah Tangga)</b>				-	-	-	-
	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun (Dokumen)		-	1	1	1	1	1
	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi (Dokumen)		-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi (Rumah Tangga)		-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	1	1	1	1	1

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Kelompok Masyarakat)		-	-	-	-	-	-
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>							
	Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh spal regional	0,00%	16,67 %	17,05 %	17,81 %	18,95 %	20,47 %	20,47 %
	Presentase rumah tinggal bersanitasi	0,060%	0,078 %	0,093 %	0,102 %	0,109 %	0,115 %	0,115 %
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>							
	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Domestik (Unit)</b>		500	600	660	700	740	740
	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen)		-	1	1	1	1	1
	Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan (Unit)		2	2	2	2	2	2
	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Rumah Tangga)		300	350	380	400	420	420
	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Dokumen)		-	-	-	-	-	1
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (Kelompok Masyarakat)		1	1	1	1	1	1
	Jumlah personil yang mendapatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik (orang)		-	-	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	-	1	1	1	1
	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara (unit)		200	250	280	300	320	320
V	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>							
	Persentase Luas daerah genangan yang tertangani	3,71%	3,89%	4,07%	4,25%	4,43%	4,61%	4,61%
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (Provinsi)	0,37%	3,55%	4,56%	5,91%	7,09%	8,31%	8,31%
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi</b>							
	<b>Jumlah Sistem Drainase perkotaan yang disediakan, yang beroperasi dan terpelihara (Unit)</b>		444	571	739	887	1.040	1.040
	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)		1	1	1	1	1	1
	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)		1	1	1	1	1	1
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan (orang)		1	1	1	1	1	1
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (unit)		15	20	25	30	40	40
	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)		429	551	714	857	1.000	1.000

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>							
	<b>Persentase Penanganan Infrastruktur di Kawasan Strategis Permukiman</b>	<b>20%</b>	<b>21,89%</b>	<b>23,67%</b>	<b>26,37%</b>	<b>37,25%</b>	<b>41,70%</b>	<b>41,70%</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</b>							
	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang dibangun dan dikembangkan, di pelihara di kawasan Strategis Daerah Provinsi (Sistem Jaringan)		-	-	-	-	-	-
	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (sistem jaringan)		150	110	150	200	250	250
	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara (sistem jaringan)		507	600	641	918	1.001	1.001
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>							
	<b>Persentase bangunan strategis provinsi yang dilakukan penataan</b>	<b>20,36%</b>	<b>23,33%</b>	<b>26,67%</b>	<b>33,33%</b>	<b>40,00%</b>	<b>46,67%</b>	<b>46,67%</b>
	<b>Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>							
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Renovasi Ubahsuai (Unit)		-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)		3	3	3	3	3	3
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai (Unit)		2	3	4	5	6	6
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)		2	2	3	4	5	5
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>							
	<b>Persentase bangunan strategis provinsi serta penataan lingkungan di KSP</b>	<b>16,00%</b>	<b>18,57%</b>	<b>20,00%</b>	<b>24,29%</b>	<b>28,57%</b>	<b>32,86%</b>	<b>32,86%</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>							
	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)		-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)		13	14	17	20	23	23
	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)		2	3	4	5	6	20
	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)		2	3	4	5	5	19
	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota (Dokumen)		13	13	13	13	13	13
	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)		1	1	1	1	1	5

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							
	Persentase indikator program Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang tercapai	78,20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat ( <i>customer/stakeholder</i> )	50	77	79	82	85	88	88
	Nilai SAKIP Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	71,97	74	76	78	80	82	82
	Persentase Realisasi anggaran	98,46%	98,57%	98,68%	98,78%	98,89%	99,00%	99,00%
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							
	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah		6	6	6	6	6	30
	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5	5	5	25
	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)		2	2	2	2	2	2
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	1	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1	1	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	1	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1	1	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		1	1	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		4	4	4	4	4	4
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							
	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan		2	2	2	2	2	2
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/Bulan)		1	1	1	1	1	1
	Jumlah laporan Administrasi							
	Pelaksanaan Tugas ASN							
	Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan							
	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah							
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	1	1	1	1	1
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							
	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		2	2	2	2	2	10

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	1	1	1	1	5
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							
	<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>		4	4	4	4	4	20
	Jumlah laporan Presensi Pegawai							-
	Jumlah sarana dan prasana yg tepenuhi							-
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)		-	250	250	250	250	1.000
	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian							-
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		1	1	1	1	1	5
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
	<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>		5	5	5	5	5	25
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diisediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							
	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		5	-	-	-	-	5
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		5	-	-	-	-	5
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)		-	-	-	-	-	-
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		-	-	-	-	-	-
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	-	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		13	13	13	13	13	65
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)							-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		12	12	12	12	12	60
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	1	1	1	1	5
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		3	3	3	3	3	15
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)							-
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)							-
	<b>UPT PSDA WILAYAH 1</b>							
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>		2	2	2	2	2	10
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1	1	1	1	1	5
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							
	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	1	1	1	1	5
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		13	13	13	13	13	65
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		12	12	12	12	12	60
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	1	1	1	1	5



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		3	3	3	3	3	15
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	1	1	1	1	5
	<b>UPT PSDA WILAYAH 2</b>							
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>		5	5	5	5	5	25
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diisediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							
	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		-	1	1	1	1	4
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		-	1	1	1	1	4
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		13	13	13	13	13	65
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		12	12	12	12	12	60
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	1	1	1	1	5
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		1	1	1	1	1	5

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>UPT SPAM</b>							
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>		5	5	5	5	5	25
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diisediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	1	1	1	1	5
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							
	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		-	-	-	-	-	-
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)							-
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		14	14	14	14	14	70
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		12	12	12	12	12	60
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	1	1	1	1	5
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		3	3	3	3	3	15
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		1	1	1	1	1	5
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	1	1	1	1	5


**TABEL 7.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**RENSTRA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN)	FORMULA INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN	METODOLOGI	KETERANGAN
I.	Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	Presentase Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	<p>(Presentase Infrastruktur Keciptakaryaan pada Tahun yang akan dihitung / Presentase Infrastruktur Keciptakaryaan pada akhir tahun target sasaran Renstra) + (Presentase Infrastruktur Sumber Daya Air pada Tahun yang akan dihitung / Presentase Infrastruktur Sumber Daya Air pada akhir tahun target sasaran Renstra)</p> $\frac{\quad}{2}$	<p>Nilai Presentase Infrastruktur Keciptakaryaan dan nilai Presentase Infrastruktur Sumber Daya Air</p>	Presentase Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air dirumuskan melalui data luasan daerah irigas yang dibangun, dipelihara, direhabilitasi, dioperasikan data luas kawasan pemukiman rawan banjir dan abrasi pantai	<p>1. BIDANG IRIGASI DAN RAWA</p> <p>2. UPT PSDA WIL I &amp; II</p>
			A. Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) ditahun eksisting / Luas daerah irigasi kewenangan Provinsi X 100	<p>1. Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (ha)</p> <p>2. Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dibangun (ha)</p> <p>3. Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan (ha)</p> <p>4. Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang direhabilitasi (ha)</p> <p>5. Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dioperasikan (ha)</p> <p>6. Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dipelihara (ha)</p>		
			B. Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Provinsi (ha) / Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Provinsi	<p>1. Data luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Provinsi</p> <p>2. Data luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Provinsi (ha)</p> <p>3. Data Daerah Rawan banjir</p>		
			C. Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Provinsi (m) / Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Provinsi (m) X 100	<p>1. Data luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Provinsi (ha)</p> <p>2. Data luas kawasan permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Provinsi (ha)</p> <p>3. Data Daerah Rawan Abrasi Pantai</p>		
			D. Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi / Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Baku di WS Provinsi X 100	<p>1. Data Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Baku di WS Provinsi (ha)</p> <p>2. Data Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi.</p>		<p>1. SUNGAI, PANTAI, DANAU DAN AIR BAKU</p> <p>2. UPT PSDA WIL I DAN II</p>
			<p><u>Indikator (A) + Indikator (B) + Indikator (C) + Indikator (D)</u></p> <p>4 Indikator</p>	Data Indikator (A), Data Indikator (B), Data Indikator (C), dan Indikator (D)		<p>Bidang IRWA, Bidang SPDAB, UPT Wil I dan UPT Wil II</p>

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN)	FORMULA INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN	METODOLOGI	KETERANGAN
II.	Meningkatnya Infrastruktur Keciptakaryaan	Presentase Infrastruktur Keciptakaryaan	A. Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota / Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi bersangkutan X 100	1. Data Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi (ha) 2. Data Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota.	Presentase Infrastruktur keciptakaaryaan dirumuskan melalui data jumlah penduduk berakses air minum, fata kapasitas pengelolaan limbah, data panjang drainase yang tersumbat, dan data jumlah sistem jaringan dan bangunan gedung yang dibangun dan dikembangkan di kawasan strategis Provinsi	1. BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 2. UPT SPAM
			B. Penduduk berakses air minum / Jumlah Penduduk	1. Data Penduduk berakses air minum  2. Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota		
			C. Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional / Total kapasitas pengelolaan limbah SPAL Domestik Regional X 100	1. Data volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional 2. Data kapasitas pengelolaan limbah SPAL Domestik Regional		BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
			D. Jumlah Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pemahaman pengelolaan sampah / Jumlah kabupaten/Kota di Provinsi bersangkutan	1. Data Jumlah Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pemahaman pengelolaan sampah 2. Data Jumlah kabupaten/Kota di Provinsi bersangkutan		
			E. Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) / Panjang seluruh drainase di KSP (Km) X 100	1. Data Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) 2. Data Panjang seluruh drainase di KSP di KSP (Km <sup>2</sup> )		
			F. Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi/Jumlah rumah tinggal di KSP X 100	1. Data Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi 2. Data Jumlah rumah tinggal di KSP		
			G Luas daerah genangan tertangani (Km <sup>2</sup> ) / Luas daerah genangan di KSP (Km <sup>2</sup> ) X 100	1. Data Luas daerah genangan tertangani (Km <sup>2</sup> ) 2. Data Luas daerah genangan di KSP (Km <sup>2</sup> )		

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN)	FORMULA INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PENJELASAN	METODOLOGI	KETERANGAN
			H. Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Ditangani di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (sistem jaringan) / Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (sistem jaringan) X 100	1. Data Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (sistem jaringan) 2. Data Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Ditangani di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (sistem jaringan)		
			I. Jumlah Bangunan Gedung di Kawasan Strategis Provinsi yang dilakukan penataan (unit) / Jumlah Bangunan Gedung di Kawasan Strategis Provinsi (unit) X 100	1. Data Jumlah Bangunan Gedung di Kawasan Strategis Provinsi (unit) 2. Data Jumlah Bangunan Gedung di Kawasan Strategis Provinsi yang dilakukan penataan (unit)		
			J. Jumlah Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditangani (Kawasan) / Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan) X 100	1. Data Jumlah Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan) 2. Data Jumlah Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditangani (Kawasan)		
			$\frac{\text{Indikator (A) + Indikator (B) + Indikator (C) + Indikator (D) + Indikator (E) + Indikator (F) + Indikator (G) + Indikator (H) + Indikator (I) + Indikator (J)}}{10 \text{ Indikator}}$	Data Indikator (A), Data Indikator (B), Data dan Data Indikator (C) ,Data Indikator (D), Data Indikator ( E ), Data Indikator (F) ,Data Indikator (G), Data Indikator (H), Data Indikator (I), Data Indikator (J)		BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
DEANDI RULY DEANGGOLA, SE.,M.Si  
NIP. 19800216 200212 1 003

## BAB VIII

### PENUTUP

#### 8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 mencakup Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran selama kurun waktu Tahun 2021-2026, sesuai dengan **Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM** dan **Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.**

Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kegiatan dan sub kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan, merupakan rangkaian yang sistematis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Misi.

#### 8.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) (nama SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah agar mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur pada Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergi, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan dokumen



perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

4. Guna menjaga konsistensi dan keselarasan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka penyusunan Renja SKPD wajib berpedoman pada Renstra SKPD ini;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian targettarget Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **8.3. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana Pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun sesuai dengan Isu Strategis daerah dan perkembangan dinamika politik, sosial, budaya dan isu-isu permasalahan terkini, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Renstra ini juga merupakan Implementasi penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparatur Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, baik jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas pelayanan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dinas/badan dan sasaran pembangunan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dan berkualitas sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.